

KATALOG:
9201012.7315



INDIKATOR MAKRO SOSIAL EKONOMI BPS KABUPATEN PINRANG = 2020 =



BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN PINRANG



INDIKATOR
MAKRO SOSIAL EKONOMI
BPS KABUPATEN PINRANG
== 2020 ==

INDIKATOR MAKRO SOSIAL EKONOMI KABUPATEN PINRANG 2020

Nomor Publikasi : 73150.2023
Katalog : 9201012.7315
Ukuran Buku : 14,8 cm x 21 cm
Jumlah Halaman : vii+59 halaman

Naskah : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang

Gambar Kulit : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang

© Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersil tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

KATA PENGANTAR

Pembuatan publikasi ini didasarkan akan semakin meningkatnya kesadaran pengguna data di Kabupaten Pinrang akan data yang bersifat universal/umum, update dan strategis berkaitan tentang data sosial ekonomi di Kabupaten Pinrang.

Data yang dicakup dalam publikasi ini antara lain kependudukan, tenaga kerja, PDRB, pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), produksi berbagai jenis tanaman pangan serta data kemiskinan.

Akhirnya semoga publikasi ini dapat bermanfaat untuk seluruh konsumen data. Tidak lupa kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi baik langsung maupun tidak langsung dalam terciptanya publikasi ini. Kritik dan saran sangat ditunggu untuk perbaikan publikasi-publikasi berikutnya.

Pinrang, November 2020
Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Pinrang



Muhammad Asri Lantong, SE
NIP.19661121 199301 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	v
Daftar Grafik	vii
Penjelasan Teknis	1
Penduduk & Tenaga Kerja	9
Pertumbuhan Ekonomi	23
Indeks Pembangunan Manusia	33
Kemiskinan Penduduk	51
Daftar Pustaka	57

DAFTAR TABEL

No Tabel	Nama Tabel	Hal
1.1	Jumlah Penduduk Pinrang Menurut Kelompok Umur dan Rasio Jenis Kelamin, 2019	11
1.2	Persentase Penduduk Kabupaten Pinrang Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Produktif Tahun 2019	12
1.3	Jumlah Penduduk Pinrang Menurut Kecamatan Tahun 2015-2019 (Jiwa)	14
1.4	Penduduk berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Kegiatan Seminggu yang Lalu Kabupaten Pinrang Tahun 2018 & 2019	17
1.5	Penduduk berumur 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja di Kabupaten Pinrang Selama Seminggu Yang Lalu Menurut Lapangan Pekerjaan Utama, Tahun 2013-2019	18
1.6	Penduduk berumur 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja di Kabupaten Pinrang Selama Seminggu Yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama, Tahun 2014 - 2019	19
1.7	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2017-2019	20
1.8	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2014-2019	22
2.1	PDRB, Pertumbuhan Ekonomi, dan Distribusinya Menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2010 Kabupaten Pinrang, 2019**)	26
2.2	PDRB Kabupaten Pinrang Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 (milyar rupiah) dan Laju Pertumbuhannya (%), Tahun 2019**)	27
2.3	PDRB, Pertumbuhan Ekonomi dan Distribusinya Menurut Pengeluaran Tahun Dasar 2010 Kabupaten Pinrang Tahun 2019**)	28
2.4	Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Selatan Atas Dasar Harga Konstan 2015-2019 (Persen)	30
2.5	PDRB Perkapita Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2019 (Juta Rupiah)	31
2.6	PDRB Perkapita Menurut Kabupaten/Kota Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2015-2019 (Juta Rupiah)	32

No Tabel	Nama Tabel	Hal
2.7	PDRB Sulawesi Selatan Menurut Kabupaten/Kota Atas Dasar Harga Berlaku Dan Konstan Tahun 2018 & 2019 (miliar rupiah)	33
2.8	Peranan PDRB Menurut Kabupaten/Kota Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010 dan 2019 (Persen)	34
3.1	IPM dan Komponen Pembentuknya Kabupaten Pinrang, Tahun 2015-2019	43
3.2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2015-2019	43
3.3	Komponen Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2018 & 2019	44
3.4	Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Kabupaten/Kota, 2014-2019	46
3.5	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Kabupaten/Kota, 2015-2019	48
4.1	Statistik Kemiskinan Kabupaten Pinrang Tahun 2015-2019	53
4.2	Indikator Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan, 2013-2019	55

DAFTAR GRAFIK



No Grafik	Nama Grafik	Hal
1.1	Piramida Penduduk Kabupaten Pinrang 2019	13
1.2	Jumlah Penduduk Usia Kerja Kabupaten Pinrang Tahun 2010-2019	16
1.3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Pinrang Tahun 2010-2019	17
1.4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Pinrang Tahun 2010-2019	21
2.1	Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019 (Persen)	25
2.2	Laju Pertumbuhan PDRB (persen) Tahun 2014-2019	29
3.1	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pinrang Tahun 2010-2019	42
4.1	Persentase Penduduk Miskin kabupaten Pinrang Tahun 2013-2019	54



Penduduk

Semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama enam bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap.

Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio*)

Perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (angkatan kerja).

Produk Domestik Regional Bruto

Penjumlahan nilai tambah dalam satu periode tertentu di suatu wilayah tertentu dikenal dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Output

Output perusahaan adalah nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu periode tertentu meliputi produksi utama, produksi ikutan maupun produksi sampingan. *Output* tersebut merupakan hasil perkalian antara kuantitas produksi dengan unit harganya.

Nilai Tambah

Nilai tambah merupakan nilai yang ditambahkan atas nilai barang dan jasa sebagai biaya antara agar menjadi output. Oleh karenanya secara matematis nilai tersebut dapat dihitung menggunakan formula sederhana berikut ini.

$$\text{NTB} = \text{Output} - \text{Input antara}$$

$$\text{NTB} = \text{nilai tambah bruto}$$

Biaya Antara

Biaya antara terdiri dari barang dan jasa yang digunakan di dalam proses produksi. Pengeluaran untuk barang dan jasa sebagai suatu kewajiban untuk penyelesaian pekerjaan, diperlakukan sebagai biaya antara.

Pertumbuhan ekonomi triwulan ke triwulan (*q to q*)

PDB atas dasar harga konstan pada suatu triwulan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

Pertumbuhan ekonomi tahun ke tahun (*y on y*)

PDB atas dasar harga konstan pada suatu triwulan dalam tahun tertentu dibandingkan dengan triwulan yang sama pada tahun sebelumnya.

Pertumbuhan ekonomi c to c

PDB atas dasar harga konstan kumulatif sampai dengan suatu triwulan dibandingkan periode kumulatif yang sama pada tahun sebelumnya.

Sumber pertumbuhan (*source of growth*) menunjukkan sektor atau komponen pengeluaran dalam PDB yang menjadi penggerak pertumbuhan. Untuk memperoleh sumber-sumber pertumbuhan, laju pertumbuhan ekonomi ditimbang dengan masing-masing *share* sektor atau komponen pengeluaran terhadap PDRB.

Kemiskinan

Kemiskinan adalah ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Penduduk miskin

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah Garis Kemiskinan.

Garis Kemiskinan

Garis Kemiskinan (GK) terdiri dari dua komponennya itu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Nonmakanan (GKNM).

$$\text{GK} = \text{GKM} + \text{GKNM}$$

Penghitungan Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.

Garis Kemiskinan Makanan (GKM)

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kkalori perkapita perhari. Patokan ini mengacu pada hasil Widyakarya Pangan dan Gizi 1978. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll). Ke 52 jenis komoditi ini merupakan komoditi-komoditi yang paling banyak dikonsumsi oleh orang miskin. Jumlah pengeluaran untuk 52 komoditi ini sekitar 70 persen dari total pengeluaran orang miskin.

Garis Kemiskinan Nonmakanan (GKNM)

Garis Kemiskinan Nonmakanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar

nonmakanan diwakili oleh 51 jenis komoditi perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

Ukuran Kemiskinan

- a. *Head Count Index* (HCI-P0), yaitu persentase penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan (GK).
- b. Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index*-P1) adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.
- c. Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index*-P₂) adalah ukuran yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Usia Kerja

Indonesia menggunakan batas bawah usia kerja (*economically active population*) 15 tahun (meskipun dalam survei dikumpulkan informasi mulai dari usia 10 tahun) dan tanpa batas usia kerja.

Angkatan Kerja

Konsep angkatan kerja merujuk pada kegiatan utama yang dilakukan oleh penduduk usia kerja selama periode tertentu. Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan penganggur.

Bukan Angkatan Kerja

Penduduk usia kerja yang tidak termasuk angkatan kerja mencakup penduduk yang bersekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya (pensiun, penerima transfer/kiriman, penerima deposito/bunga bank, jompo atau alasan lainnya).

Bekerja

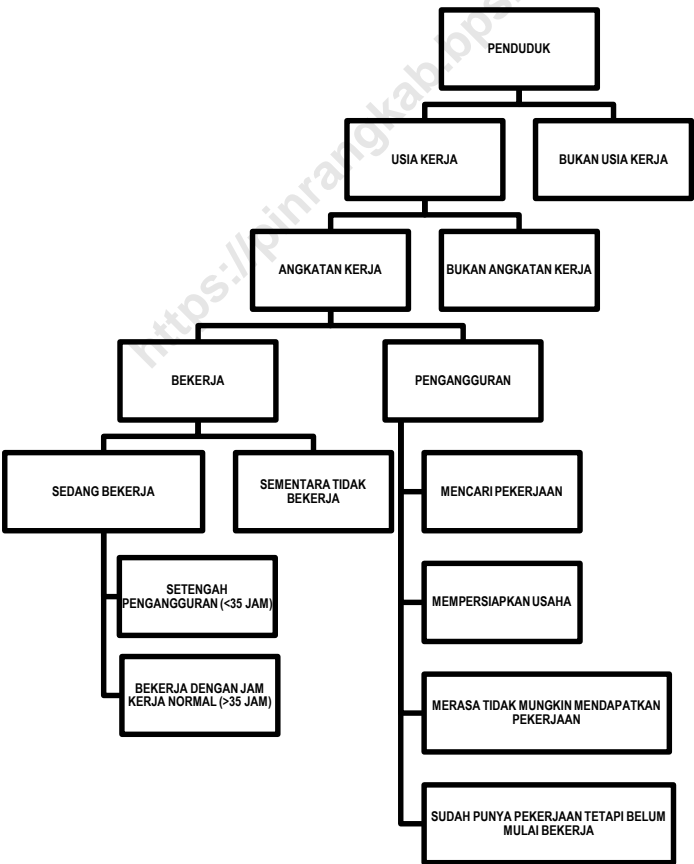
Kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit selama satu jam dalam seminggu yang lalu. Bekerja selama satu jam tersebut harus dilakukan secara berturut dan tidak terputus. Penghasilan atau keuntungan mencakup upah/gaji/pendapatan termasuk semua tunjangan dan bonus

bagi pekerja/karyawan/pegawai dan hasil usaha berupa sewa, bunga, atau keuntungan, baik berupa uang atau barang bagi pengusaha.

Pengangguran

Penganggur adalah mereka yang sedang mencari pekerjaan, atau mereka yang mempersiapkan usaha, atau mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (sebelumnya dikategorikan sebagai bukan angkatan kerja), dan mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja (sebelumnya dikategorikan sebagai bekerja), dan pada waktu yang bersamaan mereka tak bekerja (*jobless*). Penganggur dengan konsep/definisi tersebut biasanya disebut sebagai penganggur terbuka (*open unemployment*).

Diagram Ketenagakerjaan



Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

TPAK mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara atau wilayah. TPAK diukur sebagai persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. Indikator ini menunjukkan besaran relatif dari pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang-barang dan jasa dalam perekonomian.

Inflasi

Inflasi merupakan indikator perkembangan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Barang dan jasa tersebut jumlahnya sangat banyak, namun “keranjang” barang dan jasa yang digunakan untuk menghitung konsumsi rumah tangga seluruhnya berjumlah 774 komoditas. Jumlah komoditas tersebut bervariasi antarkota, yang terkecil terdapat di Kota Tarakan sebanyak 284 komoditas, sedangkan yang terbanyak terdapat di Jakarta (441 komoditas), secara rata-rata sebanyak 335 komoditas (dari 66 kota). Angka tersebut merupakan hasil Survei Biaya Hidup (SBH) tahun 2007 yang merupakan patokan untuk menyusun inflasi.

Ekspor dan Impor

Konsep dan definisi yang dipakai dalam pencatatan ekspor-impor barang yang dilakukan oleh BPS berdasarkan konsep dan definisi dalam *International Merchandise Trade Statistics: Concepts and Definitions* (series M no. 52 Revisi 2) yang diterbitkan oleh United Nations tahun 1998. Sebagai anggota *United Nations Statistical Office* dan berdasarkan konvensi internasional maka BPS harus mengikuti/memakai konsep dan definisi tersebut. Dengan demikian data yang dihasilkan oleh BPS bisa dipakai untuk perbandingan internasional.

Berdasarkan konsep dan definisi *International Merchandise Trade Statistics* beberapa hal dapat diberikan di sini.

- a. Ekspor barang adalah seluruh barang yang dibawa ke luar dari wilayah suatu negara, baik bersifat komersial maupun nonkomersial (seperti barang hibah, sumbangan, hadiah), serta barang yang akan diolah di luar negeri yang hasilnya dimasukkan kembali barang yang dikirim untuk perwakilan suatu negara di luar negeri; (3) Barang untuk eksepsi/pameran; (4) Peti kemas untuk diisi kembali; (5) Uang dan surat-surat berharga; (6) Barang-barang untuk contoh (*sample*).
- b. Impor barang adalah seluruh barang yang masuk ke wilayah suatu negara baik bersifat komersial maupun bukan komersial, serta barang yang akan diolah di dalam negeri yang hasilnya dikeluarkan lagi dari negara tersebut. Tidak termasuk

dalam statistik impor adalah: (1) Pakaian dan barang-barang perhiasan penumpang; Barang-barang penumpang untuk dipakai sendiri, kecuali lemari es, pesawat TV dan sebagainya; (2) Barang-barang yang dikirim untuk keperluan perwakilan (kedutaan) suatu negara; (3) Barang-barang untuk ekspedisi/penelitian ilmiah dan eksebis/pameran; (4) Pembungkus/peti kemas; (5) Uang dan surat-surat berharga; (6) Barang-barang sebagai contoh (sampel).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indek Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM merupakan rata-rata dari indeks longevity, indeks pendidikan dan indeks tingkat hidup layak. Terdapat 4 indikator (dari 3 dimensi) pembentuk angka IPM :

1. Dimensi Kesehatan diukur dengan indikator : Angka Harapan Hidup,
2. Dimensi Pendidikan diukur dengan indikator : Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah,
3. Dimensi Hidup Layak diukur dengan indikator : Pengeluaran Perkapita Disesuaikan.

Capaian IPM diklasifikasikan menjadi beberapa kategori, yaitu: (1) Sangat Tinggi ($IPM \geq 80$); (2) Tinggi ($70 \leq IPM < 80$); (3) Sedang ($60 \leq IPM < 70$); (4) Rendah ($IPM < 60$). Pengklasifikasian pembangunan manusia bertujuan untuk mengorganisasikan wilayah-wilayah menjadi kelompok-kelompok yang sama dalam hal pembangunan manusia.

Ukuran Kecepatan / Reduksi Shortfall IPM

Untuk mengukur kecepatan perkembangan IPM dalam suatu kurun waktu digunakan ukuran pertumbuhan IPM per tahun. Pertumbuhan IPM menunjukkan perbandingan antara capaian yang telah ditempuh dengan capaian sebelumnya. Semakin tinggi nilai pertumbuhan, semakin cepat IPM suatu wilayah untuk mencapai nilai maksimalnya.

$$\text{Pertumbuhan IPM} = \frac{(IPM_t - IPM_{t-1})}{IPM_t} \times 100$$

Indeks Pembangunan Gender (IPG)

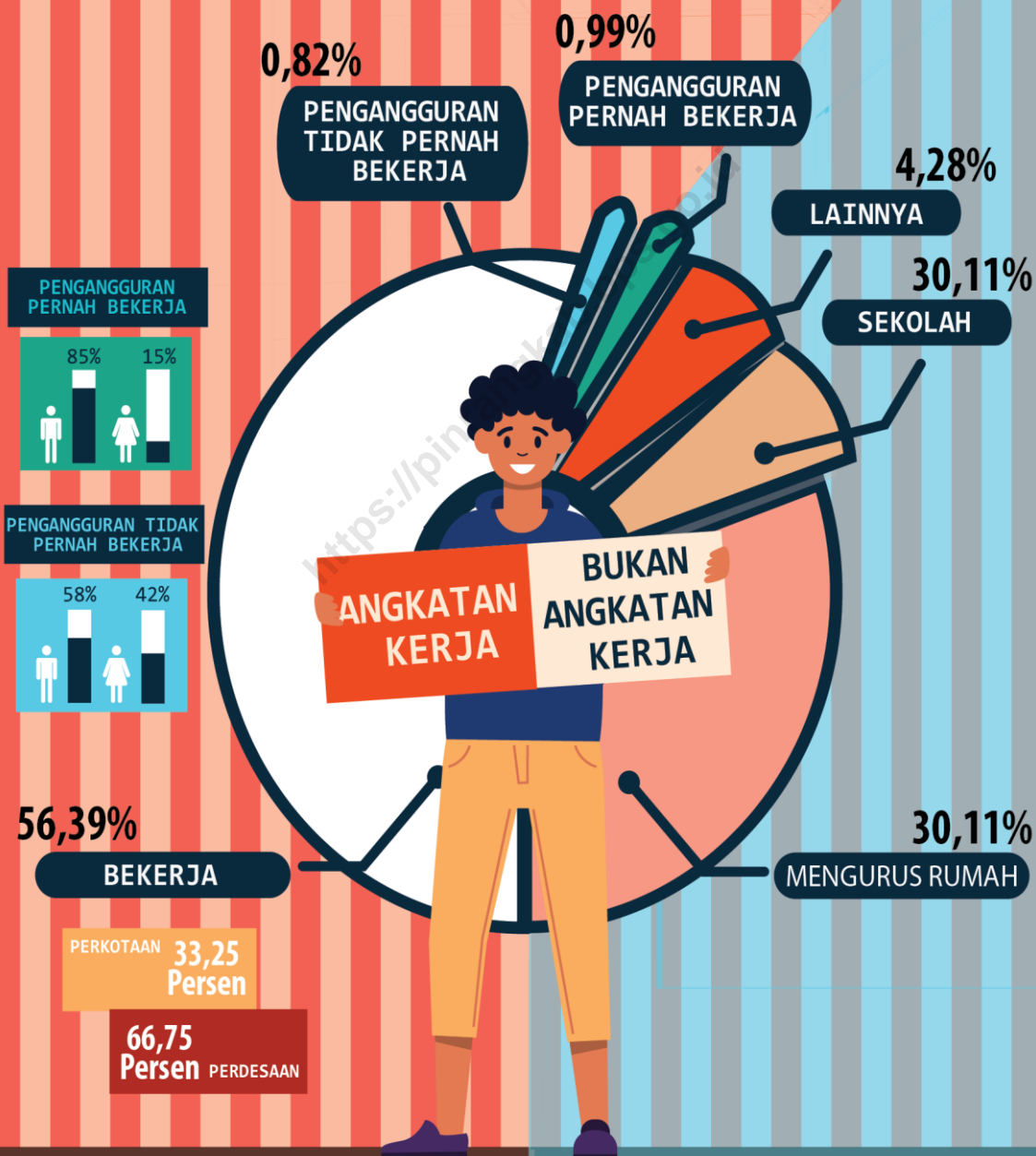
Mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan. IPG merupakan rasio IPM perempuan dengan laki-laki. Semakin mendekati angka 100, maka semakin kecil ketimpangan yang terjadi antara perempuan dengan laki-laki.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG menitikberatkan pada partisipasi, dengan cara mengukur ketimpangan gender di bidang ekonomi, partisipasi politik, dan pengambilan keputusan.

01

PENDUDUK DAN TENAGA KERJA



Jumlah penduduk yang dihasilkan oleh BPS telah mengacu pada konsep dan definisi yang telah disepakati internasional. Oleh karena itu, angka yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan dan diperbandingkan antar negara. Penduduk didefinisikan sebagai semua orang yang berdomisili di suatu wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap.

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Pinrang Menurut Kelompok Umur dan Rasio Jenis Kelamin, 2019

Kelompok Umur	Jumlah Penduduk (Ribuan Jiwa)			Rasio Jenis Kelamin
	Laki-laki	Perempuan	Total	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0 - 4	18 298	17 516	35 814	104,46
5-9	18 894	18 104	36 998	104,36
10-14	18 531	17 974	36 505	103,10
15 - 19	16 048	15 296	31 344	104,92
20 - 24	14 411	14 190	28 601	101,56
25 - 29	13 605	14 024	27 629	97,01
30 - 34	12 066	12 964	25 030	93,07
35 - 39	11 504	13 199	24 703	87,16
40 - 44	12 558	13 685	26 243	91,76
45 - 49	11 870	13 250	25 120	89,58
50 - 54	9 868	11 439	21 307	86,27
55 - 59	7 860	9 302	17 162	84,50
60 - 64	6 298	7 683	13 981	81,97
65 - 69	4 721	5 787	10 508	81,58
70 - 74	3 243	4 484	7 727	72,32
75 +	3 354	5 093	8 447	65,86
Jumlah	183 129	193 990	377 119	94,40

Sumber : Proyeksi Penduduk, BPS

Jumlah penduduk yang besar pada suatu wilayah dapat menjadi suatu modal ataupun beban bagi pembangunan wilayah tersebut. Penduduk akan menjadi beban dalam pembangunan apabila jumlah penduduk yang besar tetapi penduduk tersebut

memiliki kualitas yang rendah. Berdasarkan Tabel 1.1, jumlah penduduk perempuan (193.990) lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk laki-laki (183.129) dengan rasio jenis kelamin (*sex ratio*) sebesar 94,40 di Kabupaten Pinrang. Diharapkan, dengan diperolehnya data penduduk Kabupaten Pinrang yang akurat, maka dapat teridentifikasinya berbagai permasalahan mengenai kependudukan yang terjadi secara riil di masyarakat, mulai dari masalah jumlah, persebaran hingga komposisi penduduk yang tidak merata antara kota dan desa.

Tabel 1.2 Persentase Penduduk Kabupaten Pinrang Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Produktif, 2019

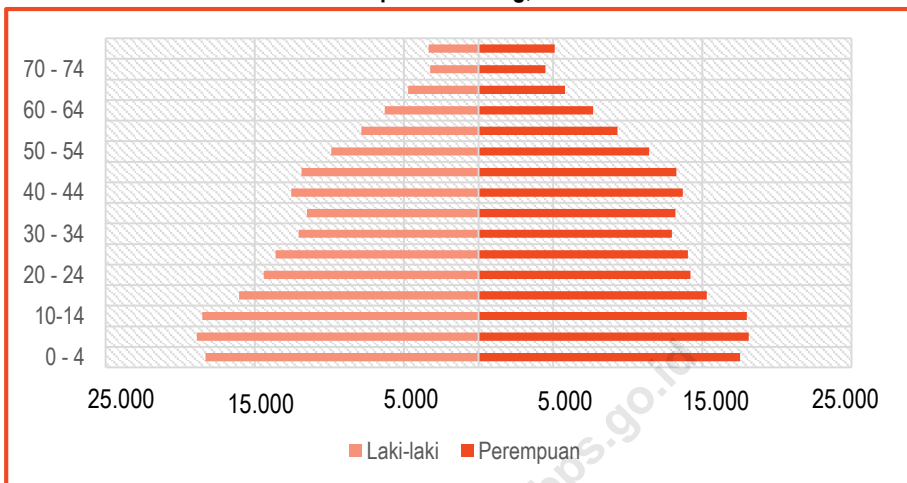
Kelompok Umur	Jenis Kelamin (%)		
	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
0 – 4	30,43	27,63	29,03
15 – 64	63,39	64,45	63,92
65+	6,18	7,92	7,05
Jumlah Penduduk	183 129	193 990	377 119

Sumber : Proyeksi Penduduk. BPS

Penduduk Kabupaten Pinrang tahun 2019 tercatat sebagian besar berada dalam kelompok usia produktif yaitu 15-64 tahun yaitu sekitar 63,92 persen (Tabel 1.2). Data menunjukkan juga bahwa pada tahun 2019 rasio ketergantungan (*dependency ratio*) atau lebih dikenal dengan angka beban ketergantungan mencapai 56,403 persen. Artinya dari 100 orang usia produktif (15-64 Tahun) harus menanggung 56 orang usia tidak produktif (0-14 tahun dan 65+ tahun).

Berdasarkan jenis kelamin terlihat bahwa persentase penduduk usia produktif perempuan (64,45 persen) lebih besar dibanding laki-laki (63,39 persen) pada usia produktif, begitu pula pada usia tidak produktif (kelompok umur 0-14 dan 65+) persentase penduduk laki-laki lebih kecil dibandingkan penduduk perempuan. Data ini dapat menggambarkan komposisi penduduk di Kabupaten Pinrang yang cenderung lebih banyak penduduk perempuan dibandingkan laki-laki, sehingga peranan perempuan lebih besar dalam hal ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) pada usia produktif. Hal tersebut dapat menjadi dasar pertimbangan otoritas pemangku kebijakan daerah untuk lebih banyak menyediakan lapangan pekerjaan serta program-program membangun yang dapat mengoptimalkan ketersediaan SDM penduduk perempuan.

Gambar 1.1 Piramida Penduduk Kabupaten Pinrang, 2019



Sumber: Proyeksi Penduduk, BPS Pinrang

Melihat bentuk piramida penduduk Kabupaten Pinrang tahun 2019 cenderung seperti jenis piramida muda (ekspansif) yang biasanya berada di negara-negara berkembang. Bentuk piramida ini ditandai dengan suatu wilayah yang memiliki angka kelahiran yang tinggi dan angka kematian yang rendah sehingga wilayah ini biasanya mengalami pertumbuhan penduduk yang cepat. Piramida ini ditandai juga dengan sebagian besar penduduknya masuk ke dalam kelompok umur muda. Adapun ciri khusus dari jenis piramida ini antara lain:

- Jumlah penduduk usia muda (0–19 tahun) sangat besar, sedangkan usia tua sedikit. Angka kelahiran jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan angka kematian.
- Pertumbuhan penduduk relatif tinggi.
- Sebagian besar terdapat di negara-negara berkembang, seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, Republik Rakyat Cina, Mesir, dan India.

Selanjutnya, Tabel 1.3 menampilkan jumlah penduduk Kabupaten Pinrang hasil proyeksi penduduk pada setiap kecamatan. Selama kurun waktu empat tahun terakhir, jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Wattang Sawitto dengan tren yang selalu naik setiap tahun. Sebaliknya, jumlah penduduk terendah berada di Kecamatan Batulappa meskipun tren jumlah penduduknya naik setiap tahun.

Tabel 1.3 Jumlah Penduduk Kabupaten Pinrang Menurut Kecamatan, 2015 – 2019 (Jiwa)

Kecamatan	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Suppa	31 687	31 929	32 159	32 362	32 580
Mattiro Sompe	28 126	28 339	28 540	28 718	28 911
Lanrisang	17 518	17 651	17 775	17 885	18 004
Mattiro Bulu	27 839	28 053	28 251	28 429	28 620
Watang Sawitto	55 144	55 571	55 972	56 329	56 713
Paletang	39 799	40 107	40 397	40 655	40 934
Tiroang	21 943	22 112	22 269	22 410	22 561
Patampunua	32 645	32 894	33 126	33 336	33 562
Cempa	17 833	17 970	18 097	18 213	18 337
Duampunua	45 096	45 438	45 761	46 049	46 358
Batulappa	99 53	10 027	10 098	10 161	10 232
Lembang	39 206	39 504	39 785	40 036	40 307
Pinrang	366 789	369 595	372 230	374 583	377 119

Sumber: Proyeksi Penduduk, BPS

Para pengguna data kependudukan, khususnya para perencana, dan pengambil kebijakan sangat membutuhkan data penduduk yang berkesinambungan dari tahun ke tahun. Akan tetapi, sumber data penduduk yang tersedia hanya secara periodik, yaitu Sensus Penduduk (SP) pada tahun yang berakhir dengan angka 0 (nol) dan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) pada pertengahan dua sensus atau tahun-tahun yang berakhir dengan angka 5 (lima). Untuk mendapatkan data jumlah penduduk yang ideal maka seharusnya membutuhkan pendataan lengkap yakni sensus penduduk secara periodik tahunan. Tetapi kegiatan sensus penduduk dewasa ini di Indonesia secara umum belum dapat dilakukan secara tahunan, ditambah sumber data kependudukan lain yaitu registrasi penduduk masih belum sempurna cakupan pencatatannya sehingga datanya belum dapat digunakan untuk perencanaan pembangunan nasional. Oleh karena itu, mengacu amanat undang-undang tentang statistik maka pelaksanaannya hanya dilakukan 10 tahun sekali, BPS telah melaksanakannya mulai tahun 1970 hingga yang terakhir tahun 2010 dan akan dilaksanakan kembali pada tahun 2020.

Suatu perencanaan yang berkaitan dengan rakyat pastilah harus ditunjang dengan data jumlah penduduk, persebaran dan komposisinya menurut kelompok umur

penduduk yang relevan. Oleh karena sensus yang dilaksanakan oleh BPS hanya setiap 10 tahun sekali, maka dilakukan proyeksi penduduk dengan suatu perhitungan ilmiah yang didasarkan pada asumsi dari komponen-komponen laju pertumbuhan penduduk, yaitu kelahiran, kematian, dan perpindahan. Ketiga komponen inilah yang menentukan besarnya jumlah penduduk dan struktur umur penduduk di masa yang akan datang. Untuk menentukan masing-masing asumsi diperlukan data yang menggambarkan tren di masa lampau hingga saat ini, faktor-faktor yang mempengaruhi komponen-komponen itu, dan hubungan antara satu komponen dengan yang lain serta target yang diharapkan tercapai pada masa yang akan datang.

Secara umum berdasarkan hasil proyeksi penduduk, jumlah penduduk Kabupaten Pinrang pada tahun 2019 menempati urutan keenam terbesar di Sulawesi Selatan. Tercatat jumlah penduduk sebesar 377.119 jiwa atau meningkat 0,67 persen dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 374.583 jiwa (tahun 2018). Jika melihat persebaran jumlah penduduk terlihat bahwa penduduk Kabupaten Pinrang sebagian besar berada di ibukota Kabupaten yaitu Kecamatan Watang Sawitto dengan jumlah penduduk 56.713 jiwa atau 15,04 persen. Keadaan ini tidak mengherankan dikarenakan Kecamatan Watang Sawitto merupakan pusat pemerintahan dan perekonomian di Kabupaten Pinrang. Sedangkan, tiga kecamatan yang mempunyai jumlah penduduk terendah berdasarkan proyeksi penduduk adalah Batulappa, Larisang dan Cempa yang ditunjang karena cakupan wilayah yang relatif lebih kecil dibandingkan kecamatan yang lain.

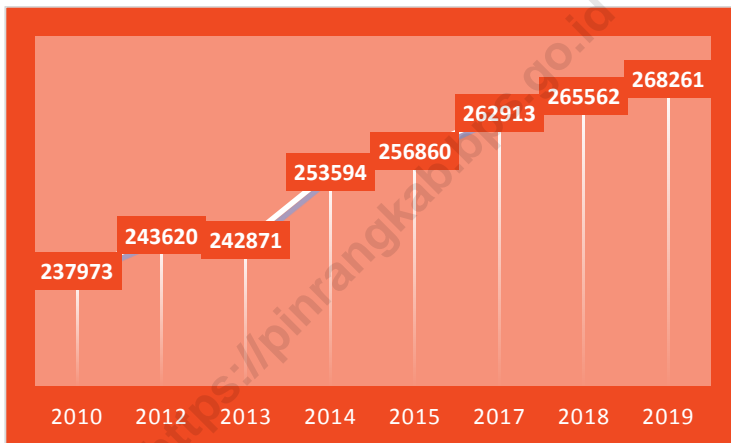
Ketenagakerjaan

Kebutuhan dasar selain sandang, pangan dan papan adalah pekerjaan. Status bekerja tidak hanya merupakan status sosial di masyarakat tetapi jauh lebih dari itu merupakan ibadah dan tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Indikator ketenagakerjaan merupakan salah satu aspek penting untuk mengevaluasi perencanaan pembangunan suatu daerah dalam hal penyerapan tenaga kerja sekaligus produktifitas tenaga kerja.

Perlu diakui pekerjaan adalah motor perekonomian, apabila perekonomian ini tidak mampu menyerap tenaga kerja maka akan menciptakan pengangguran dan akibatnya akan timbul masalah-masalah sosial di masyarakat. Dikarenakan keterbatasan data dalam hal estimasi tingkat kabupaten/kota seluruh Indonesia maka pada publikasi ini pada tahun 2016 data tidak ditampilkan.

Tren jumlah penduduk usia kerja di Kabupaten Pinrang terus meningkat dari tahun ke tahun, walaupun sempat terjadi penurunan pada tahun 2013. Penurunan tersebut dikarenakan fenomena pergeseran sistem pertanian dari yang awalnya tradisional menjadi lebih menggunakan teknologi terutama pada saat penanaman, pemeliharaan sampai pemanenan sehingga tidak membutuhkan tenaga kerja yang banyak lagi. Selain itu, sektor non pertanian yang semakin meningkat serta kemudahan teknologi terutama dalam sektor industri dan jasa juga memengaruhi banyaknya jumlah penduduk usia kerja di Kabupaten Pinrang.

Gambar 1.2 Jumlah Penduduk Usia Kerja Kabupaten Pinrang, 2010-2019



Ket : Tahun 2016 data tidak tersedia karena tidak dilakukan analisis hingga tingkat kabupaten
 Sumber : BPS Pinrang

Selain itu, penduduk berusia 15 tahun ke atas dapat digolongkan menjadi angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja merupakan mereka yang bekerja dan sedang mencari pekerjaan. Sedangkan, yang termasuk bukan angkatan kerja adalah mereka yang kegiatan utamanya sekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya yang dijelaskan oleh tabel di bawah (Tabel 1.4). Tabel 1.4 menjelaskan bahwa persentase angkatan kerja di Kabupaten Pinrang pada tahun 2019 lebih besar dibandingkan dengan bukan angkatan kerja, yaitu sebesar 58,19 persen. Persentase tersebut terdiri dari persentase penduduk yang bekerja (56,39 persen) dan penduduk yang menganggur (1,81 persen). Dibandingkan tahun 2018, jumlah pengangguran di tahun 2019 cenderung meningkat sekitar 0,01 persen yang menyebabkan jumlah angkatan kerja menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang pada tahun 2018 sempat mengalami kenaikan.

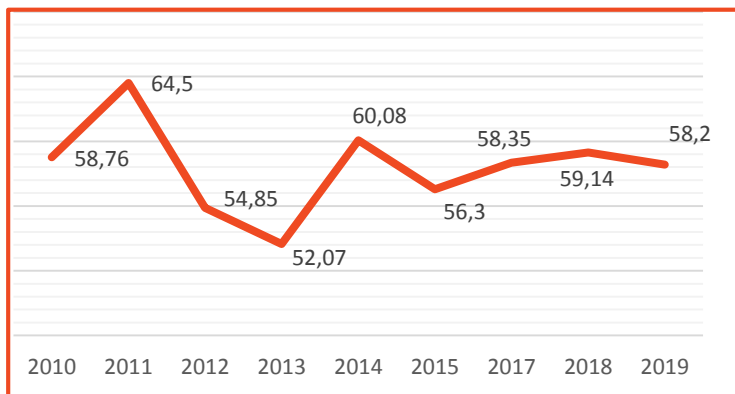
Tabel 1.4 Penduduk berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Kegiatan Seminggu yang Lalu Kabupaten Pinrang, 2018 & 2019

Kegiatan	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)
Angkatan Kerja	153 422	157 047	156117
Bekerja	146 653	152 277	151266
(%)	55,78	57,34	56,39
Penganggur	6 769	4 770	4851
(%)	2,57	1,80	1,81
Bukan Angkatan Kerja	109 491	108 515	112144
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	56,35	59,14	58,2
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,41	3,04	3,11

Sumber : BPS Pinrang, 2018

Selanjutnya, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menjadi salah satu ukuran yang menunjukkan berapa banyak jumlah tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang/jasa dalam suatu perekonomian. Menurut data Sakernas yang dihasilkan oleh BPS diketahui bahwa TPAK di Kabupaten Pinrang tahun 2019 sebesar 58,2 persen yang artinya dari 100 penduduk usia kerja sekitar 58 diantaranya termasuk angkatan kerja dan sisanya tergolong bukan angkatan kerja yaitu penduduk usia kerja tetapi mempunyai kegiatan lain seperti sekolah, mengurus rumah tangga dan lain-lain.

Gambar 1.3 TPAK Kabupaten Pinrang, 2010-2019



Sumber : BPS Pinrang

Selama periode tahun 2010-2019, TPAK Kabupaten Pinrang mengalami fluktuasi terutama tahun 2011 ke tahun 2013 (turun). Gambar 1.3 juga menunjukkan TPAK tahun 2019 sebesar 58,2 atau mengalami penurunan jika dibandingkan tahun sebelumnya, padahal tahun 2018 sempat mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2017. Kondisi ini mengindikasikan penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di Kabupaten Pinrang menurun walaupun tidak terlalu signifikan.

Tabel 1.5 TPAK Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan, 2013-2019

Kabupaten/Kota	T P A K				
	2014	2015	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kep. Selayar	60,6	67,64	60,2	66,16	64,81
Bulukumba	65,02	65,35	60,56	63,29	67,02
Bantaeng	71,93	72,83	77,7	71,44	71,78
Jeneponto	61,74	60,78	63,88	67,71	66,41
Takalar	62,91	57,56	64,37	65,3	63,21
Gowa	66,32	58,33	62,17	67,42	65,64
Sinjai	68,78	65,28	69,61	68,8	65,18
Maros	62,96	65,04	57,8	59,63	62,9
Pangkep	57,6	59,25	59,36	63,5	61,22
Barro	50,39	52,63	59,47	56,73	58,55
Bone	63,94	64,94	57,98	57,3	59,84
Soppeng	57,59	56,29	60,84	63,64	57,47
Wajo	55,55	57,24	58,84	59,12	62,38
Sidrap	54	53,27	49,17	56,22	55,39
Pinrang	60,08	56,3	58,35	59,14	58,2
Enrekang	68,25	68,1	70,35	67,25	68,95
Luwu	62,5	60,78	64,69	61,79	64,69
Tana Toraja	80,31	82,79	67,12	79,71	78,5
Luwu Utara	66,68	65,81	69,21	63,9	70,4
Luwu Timur	67,21	69,75	70,03	71,21	66,52
Toraja Utara	69,8	67,56	65,33	71,86	70,51
Makassar	56,87	55,2	55,23	59,49	57,55
Pare-Pare	60,62	60,25	66,65	64,09	63,27
Palopo	58,05	54,27	59,56	58,31	60,49
Sulawesi Selatan	62,04	60,94	60,98	63,02	62,9

Sedangkan pada tingkat provinsi, TPAK Kabupaten Pinrang tahun 2019 berada diposisi 21, dan rata-rata tersebut masih dibawah rata-rata TPAK Provinsi Sulawesi Selatan yang mencapai 62,9 persen (Tabel 1.7). Artinya keterlibatan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian di Kabupaten Pinrang masih dibawah rata-rata Propinsi Sulawesi Selatan. Sehingga perlu peran serta semua pihak untuk dapat menekan angka pengangguran.

Tabel 1.6 Penduduk berumur 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja di Kabupaten Pinrang Selama Seminggu Yang Lalu Menurut Lapangan Pekerjaan Utama, 2017 - 2019

Kegiatan	2014	2015	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pertanian	70 669	73 754	60 526	58 232	55 000
Industri	6 472	10 612	94 59	12 790	26 625
Jasa	70 969	53 225	76 668	81 255	69 641
Total	148 110	137 591	146653	152277	151 266

Sumber: BPS Pinrang

Lapangan pekerjaan merupakan bidang kegiatan atau sektor dari pekerjaan/usaha/perusahaan/kantor tempat seseorang bekerja. Sedangkan, lapangan pekerjaan utama adalah sektor pekerjaan yang paling banyak menghabiskan waktu dalam bekerja dan paling besar dalam memperoleh pendapatan.

Kabupaten Pinrang adalah salah satu kabupaten besar di Sulawesi Selatan dan merupakan penyumbang *share* perekonomian terbesar pula. Potensi daerah yang terdapat di laut dan tanahnya yang relatif subur menyebabkan sektor pertanian cukup menonjol. Kabupaten Pinrang adalah salah satu andalan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai penghasil pertanian padi dan bahkan disebut sebagai lumbung padi dan perikanan terutama perikanan tangkap dan budidaya. Akan tetapi faktanya, jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian semakin berkurang dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015, sekitar 53,603 persen penduduk bekerja di sektor pertanian dan kemudian menurun setiap tahun hingga pada tahun 2019 jumlah pekerja di bidang pertanian sebesar 36,36 persen dari total orang yang bekerja di Kabupaten Pinrang. Untuk sektor jasa, tahun 2019 tetap menyerap tenaga kerja paling besar (46,038 persen) meskipun begitu persentase tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun 2018 yaitu sebesar 53,36 persen. Sedangkan untuk sektor industri cukup menggeliat atau mengalami kenaikan 9,203 persen menyerap tenaga kerja dibandingkan pada tahun

sebelumnya. Tren ini meningkat sejak lima tahun terakhir yaitu 6.472 penduduk pada tahun 2014 hingga 26.625 penduduk pada tahun 2019.

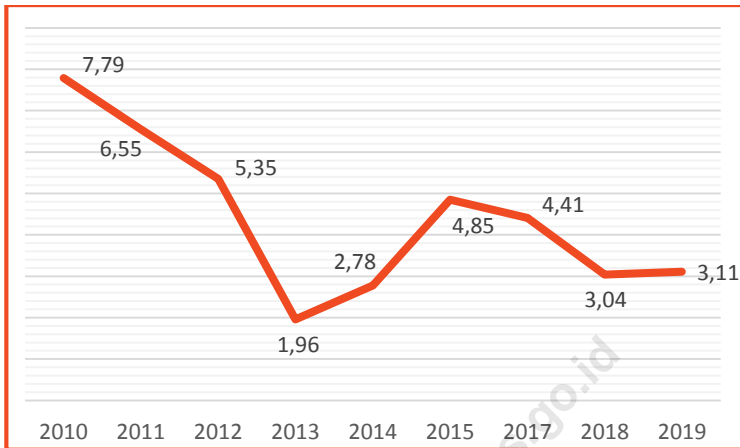
Tabel 1.7 Penduduk berumur 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja di Kabupaten Pinrang Selama Seminggu Yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Tahun 2017-2019

Kegiatan	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)
Berusaha Sendiri	31 667	32 589	41 626
Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap/Tak Dibayar	43 123	41 080	32 983
Berusaha Dibantu Buruh Tetap/Dibayar	4 249	10 607	5 972
Pekerja/Buruh/Karyawan	39 470	44 435	49 940
Pekerja Bebas	4 947	1 945	4 643
Pekerja Keluarga/Tak Dibayar	23 197	21 621	16 102
Total	146 653	152 277	151 266

Sumber: BPS Pinrang

Berdasarkan Tabel 1.7 yang menjelaskan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu menurut status pekerjaan didominasi oleh status pekerja/buruh/karyawan yaitu sebesar 33,02 persen dari total penduduk yang bekerja atau sekitar 49.940 penduduk pada tahun 2019. Angka ini mengalami kenaikan sejak tiga tahun terakhir. Hal ini juga terjadi pada status berusaha sendiri yang juga mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 21,4 persen menjadi 27,52 persen pada tahun 2019. Kenaikan ini menjadikan status berusaha sendiri menduduki nomor dua menggeser status dibantu buruh tidak tetap. Selanjutnya, untuk status pekerja yang berusaha di bantu buruh tetap/dibayar mengalami penurunan sebesar 3,01 persen dan pekerja keluarga mengalami penurunan sebesar 3,55 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Meskipun begitu, persentase pekerja bebas baik di pertanian maupun non pertanian mengalami peningkatan menjadi 3,07 persen dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar 1,28 persen. Bergesernya status pekerjaan penduduk Kabupaten Pinrang menggambarkan kondisi tenaga kerja yang mulai berorientasi ke sebagai pekerja yang di bayar (buruh; pekerja bebas) dan berusaha sendiri, hingga menggeser tenaga kerja yang berorientasi pada pekerja yang tidak di bayar.

Gambar 1.4 TPT Kabupaten Pinrang Tahun 2010-2019



Ket : Tahun 2016 data tidak tersedia karena tidak dilakukan analisis hingga tingkat kabupaten

Sumber : BPS Pinrang

Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Pinrang dalam kurun waktu tahun 2010 – 2019 mengalami fluktuasi (Gambar 1.4). Pada tahun 2010 pernah mencapai 7,79 persen dan terus mengalami penurunan hingga setidaknya hingga tahun 2013 TPT berada pada titik terendah yaitu 1,96 persen. Kemudian tahun berikutnya mengalami kenaikan 4,85 persen di tahun 2015 namun pada tahun 2017 dan 2018 TPT Kabupaten Pinrang mengalami penurunan hingga mencapai 3,04 persen. Meskipun begitu pada tahun 2019, nilai TPT mengalami kenaikan walaupun tidak terlalu tinggi yaitu sebesar 3,11 persen yang artinya dari 100 penduduk usia 15 tahun ke atas yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa (angkatan kerja) sebanyak 3 orang merupakan pengangguran.

Tabel 1.7 menjelaskan TPT menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan. TPT pada kurun waktu tahun 2014-2019. Pada tahun 2019, TPT Kabupaten Pinrang berada pada posisi 17, dengan 3,11 persen dan masih dibawah rata-rata TPT Sulawesi Selatan yang mencapai 4,97 persen. Nilai tersebut mengindikasikan bahwa persentase pengangguran di Kabupaten Pinrang berada di bawah persentase pengangguran rata-rata kabupaten/kota Sulawesi Selatan. Sedangkan, TPT tertinggi berada di Kota Makassar dengan 10,39 persen, Kota Palopo 10,32 persen dan urutan ketiga adalah Kota Pare-pre dengan 6,42 persen. Secara umum, TPT setiap Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini sejalan dengan semakin membaiknya pembangunan Sumber Daya Manusia yang digalakkan oleh

pemerintah daerah, sehingga menurunkan persentase dari pengangguran di wilayahnya.

Tabel 1.8 TPT Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan,2014-2019

Kabupaten/Kota	T P T				
	2014	2015	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kep. Selayar	2,15	0,9	2,34	1,88	1,17
Bulukumba	2,84	3	3,73	3,62	3,31
Bantaeng	2,42	4,07	5,23	3,69	3,98
Jeneponto	2,73	4	3,31	2,81	2,12
Takalar	2,75	4,04	4,93	3,88	4,13
Gowa	2,32	4,96	6,14	4,8	4,87
Sinjai	0,88	1,55	4,53	2,14	2,28
Maros	4,55	6,99	6,85	6,19	4,71
Pangkep	9,87	7,01	7,05	6,91	5,41
Barru	2,27	7,68	5,6	5,38	5,79
Bone	4,96	4,36	4,55	2,82	3,25
Soppeng	2,43	2,96	2,71	2,66	3,53
Wajo	4,92	5,39	3,06	3,79	3,3
Sidrap	6,2	6,97	3,17	4,7	4,75
Pinrang	2,78	4,85	4,41	3,04	3,11
Enrekang	1,44	1,33	1,87	1,66	2,4
Luwu	5,06	7,86	4,78	3,89	4,66
Tana Toraja	3,26	3,99	5,6	3,07	2,74
Luwu Utara	1,82	2,6	3,31	3,87	3,04
Luwu Timur	8,12	5,37	2,58	2,18	4,08
Toraja Utara	3,66	3,11	4,24	2,88	3
Makassar	10,94	12,02	10,59	12,19	10,39
Pare-Pare	7,06	8,48	6,47	6,81	6,42
Palopo	8,15	12,07	10,96	11,6	10,32
Sulawesi Selatan	5,08	5,95	5,61	5,34	4,97

Ket : Tahun 2016 data tidak tersedia karena tidak dilakukan analisis hingga tingkat kabupaten
 Sumber : BPS Pinrang

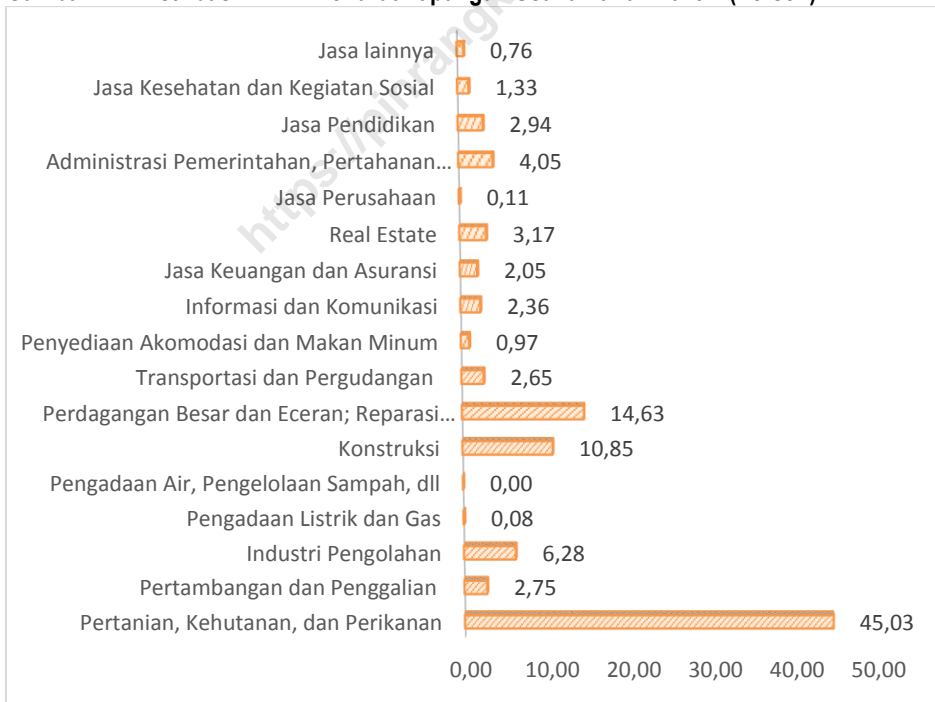
Peranan PDRB Kabupaten Pinrang terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Selatan menempati posisi ke 8 dengan sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebagai penunjang utama yaitu sebesar 47,02 persen.



Dalam perencanaan pembangunan ekonomi memerlukan beraneka ragam data statistik sebagai dasar dalam menentukan strategi kebijakan, agar tepat sasaran dalam pembangunan. Strategi dan kebijakan yang telah diambil perlu dimonitor dan dievaluasi lebih lanjut untuk mengetahui ketepatan dan keberhasilan dalam pembangunan tersebut. Berbagai data statistik yang bersifat kuantitatif diperlukan untuk memberikan gambaran tentang keadaan pada masa yang lalu dan masa kini, serta sasaran-sasaran yang akan dicapai pada masa yang akan datang.

Pada hakekatnya, pembangunan ekonomi adalah pembangunan yang bertujuan untuk mengusahakan agar pendapatan masyarakat meningkat yang disertai dengan tingkat pemerataan pendapatan. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah atau daerah adalah dengan melihat struktur ekonomi yang ditunjukkan dengan PDRB.

Gambar 2.1 Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019 (Persen)**



Sumber : BPS Pinrang

Tabel 2.1 PDRB, Pertumbuhan Ekonomi, dan Distribusinya Menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2010 Kabupaten Pinrang, 2019^{*)}

Lapangan Usaha		PDRB (Miliar Rp)		Distribusi ADHB (%)
		ADHB	ADHK	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	8 839,08	5 700,35	45,03
B	Pertambangan dan Penggalian	539,43	296,88	2,75
C	Industri Pengolahan	1 233,23	794,07	6,28
D	Pengadaan Listrik , Gas dan Produksi Es	15,60	15,32	0,08
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang	0,84	0,63	0,00
F	Konstruksi	2 130,42	1 232,74	10,85
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2 871,42	1 989,82	14,63
H	Transportasi dan Pergudangan	520,62	375,41	2,65
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	190,28	122,20	0,97
J	Informasi dan Komunikasi	462,48	401,28	2,36
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	402,04	249,46	2,05
L	Real Estate	622,57	400,74	3,17
M,N	Jasa Perusahaan	21,34	15,63	0,11
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	794,17	490,08	4,05
P	Jasa Pendidikan	576,32	406,61	2,94
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	260,90	177,19	1,33
R,S,T,U	Jasa Lainnya	149,58	101,66	0,76
PDRB		19 630,3	12 770,08	100

^{*)} Data sangat sementara

Sumber : BPS Pinrang

Dengan melihat struktur perekonomian Kabupaten Pinrang berupa PDRB Atas dasar harga berlaku tahun 2019, sebagai daerah agraris Kabupaten Pinrang masih sangat mengandalkan sumber perekonomian dari sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan kontribusi terhadap PDRB mencapai 45,03 persen (Gambar 2.1). Kemudian lapangan usaha perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dengan 14,63 persen serta sektor konstruksi yang mencapai 10,85 persen, merupakan penopang dan penggerak perekonomian utama disamping sektor-sektor lainnya.

Tabel 2.2 PDRB Kabupaten Pinrang Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 (milyar rupiah) dan Laju Pertumbuhan (%), 2019)**

Lapangan Usaha	ADHB		ADHK		Laju Pertumbuhan y on y (%)
	2018*	2019**	2018*	2019**	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	8507,08	8839,08	5514,35	5700,35	3,37
Pertambangan dan Penggalian	490,70	539,43	271,62	296,88	9,30
Industri Pengolahan	1103,17	1233,23	720,78	794,07	10,17
Pengadaan Listrik, Gas	14,16	15,60	13,75	15,32	11,38
Pengadaan Air	0,80	0,84	0,62	0,63	2,45
Konstruksi	1823,21	2130,42	1104,63	1232,74	11,60
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2512,47	2871,42	1820,61	1989,82	9,29
Transportasi dan Pergudangan	467,00	520,62	340,95	375,41	10,11
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	167,89	190,28	111,37	122,20	9,73
Informasi dan Komunikasi	413,28	462,48	361,65	401,28	10,96
Jasa Keuangan	382,34	402,04	244,13	249,46	2,19
Real Estate	580,87	622,57	379,13	400,74	5,70
Jasa Perusahaan	19,61	21,34	14,60	15,63	7,05
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	721,62	794,17	456,74	490,08	7,30
Jasa Pendidikan	515,67	576,32	375,25	406,61	8,36
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	231,97	260,90	161,51	177,19	9,71
Jasa lainnya	135,93	149,58	95,75	101,66	6,17
PDRB Pinrang	18087,78	19630,32	11987,44	12770,08	6,53
PDRB Sulsel	461719,49	504746,87	309202,40	330605,13	6,92

** Data sangat sementara
Sumber : BPS Pinrang

Sedangkan untuk laju pertumbuhan ekonomi, sektor konstruksi menempati sektor yang mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 11,06 persen. Selanjutnya disusul dengan sektor pengadaan listrik, gas (12,75 persen) dan informasi komunikasi (10,96 persen). Secara umum, PDRB menurut lapangan usaha baik atas dasar harga berlaku (ADHB) maupun atas dasar harga konstan (ADHK) mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu tahun 2018. Besarnya nilai perubahan dapat dilihat dari nilai laju pertumbuhan ekonomi setiap sektor.

Tabel 2.3 PDRB, Pertumbuhan Ekonomi dan Distribusinya Menurut Pengeluaran Tahun Dasar 2010 Kabupaten Pinrang, 2019^{*)}

Lapangan Usaha		PDRB (Miliar Rp)		Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	Distribusi (%)
		ADHB	ADHK		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	11043,7	7 113,67	6,6	56,26
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	201,53	116,25	46,11	1,03
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1559,35	907,27	8,68	7,94
4	Pembentuk Modal Tetap Domestik Bruto	6971,09	4 565,51	6,71	35,51
5	Perubahan Inventori	356,66	224,47	-	1,82
6	Net Ekspor Barang dan Jasa	-502,02	(157,08)	-	(2,56)
PDRB Kab, Pinrang		19630,32	12 770,08	6,53	100
PDRB Sulsel		504 746,87	330 605,13	6,92	

^{*)} Data sangat sementara

Sumber : BPS Pinrang

Struktur perekonomian Kabupaten Pinrang pada tahun 2019 tidak terlepas dari peranan masing-masing komponen pembentuknya. Data empiris PDRB menurut pengeluaran menunjukkan bahwa sebagian besar produk atau barang dan jasa yang tersedia pada periode tertentu digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir oleh rumah tangga, Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) dan pemerintah, dan sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik dalam bentuk Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan perubahan inventori.

Berdasarkan Tabel 2.3, selama tahun 2019 PDRB Kabupaten Pinrang sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga (PK-RT) yaitu sebesar 56,26 persen dengan laju pertumbuhan 6,6 persen. Pengeluaran

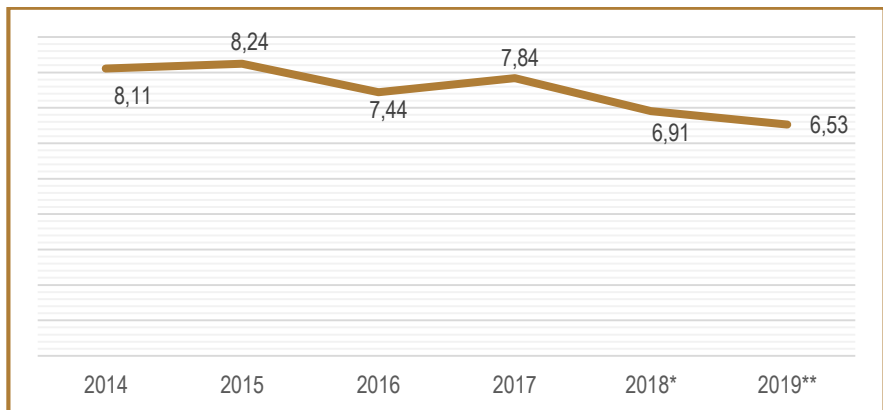
untuk aktivitas pembentukan modal (PMTB) juga mempunyai kontribusi yang besar yaitu 35,51 persen dengan laju pertumbuhan sebesar 6,71 persen. Sedangkan untuk pengeluaran konsumsi LNPRT relatif sangat dengan kontribusi relatif kecil dengan kontribusi sebesar 1,03 persen, meskipun begitu laju pertumbuhannya tertinggi diantara yang lain yaitu 46,11.

Kontribusi komponen konsumsi pemerintah (PK-P) terhadap PDRB sebesar 7,94 persen. Hal tersebut menunjukkan peran pemerintah tidak terlalu besar. Di sisi lain, pada tahun 2019 perdagangan dengan luar wilayah yang direpresentasikan oleh komponen ekspor dan impor, menunjukkan impor yang cenderung lebih tinggi dari ekspor. Hal ini terlihat dari net ekspor dan impor bernilai negatif dengan kontribusi sebesar 2,56 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian kebutuhan domestik masih harus dipenuhi oleh produk yang berasal dari luar wilayah (impor).

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pinrang selama kurun waktu 5 tahun terakhir berfluktuasi. Pada tahun 2014 tercatat pertumbuhan ekonomi 8,11 persen. Selanjutnya, tahun 2016 mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi yang tercatat hanya 7,44 persen saja. Kemudian kembali mengalami peningkatan pertumbuhan sebesar 7,85 persen (tahun 2017). Dan mengalami perlambatan kembali pada dua tahun terakhir yaitu 6,91 pada tahun 2018 dan 6,53 pada tahun 2019.

Gambar 2.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2014-2019 (Persen)



* Data sementara

** Data sangat sementara

Sumber : BPS Pinrang

Tabel 2.4 Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Selatan Atas Dasar Harga Konstan, 2015-2019 (Persen)

Kabupaten/Kota	Pertumbuhan per Tahun				
	2015	2016	2017	2018 ¹⁾	2019 ²⁾
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kep. Selayar	8,81	7,35	7,61	8,77	7,66
Bulukumba	5,66	6,77	6,89	5,05	5,49
Bantaeng	6,64	7,39	7,31	8,08	10,75
Jeneponto	6,53	8,32	8,25	6,3	5,47
Takalar	8,41	9,61	7,37	6,65	6,87
Gowa	6,8	7,57	7,21	7,11	7,46
Sinjai	7,54	7,09	7,23	7,49	6,12
Maros	8,58	9,5	6,81	6,19	1,24
Pangkep	7,98	8,31	6,6	4,76	6,41
Barru	6,32	6,01	6,48	7,08	7,41
Bone	8,3	9,01	8,41	8,9	7,01
Soppeng	5,1	8,11	8,29	8,15	7,69
Wajo	7,05	4,96	5,21	1,07	4,06
Sidrap	7,92	8,77	7,09	5,02	4,65
Pinrang	8,24	7,44	7,84	6,91	6,53
Enrekang	6,9	7,63	6,84	3,12	5,43
Luwu	7,26	7,88	6,79	6,85	6,26
Tana Toraja	6,85	7,29	7,47	7,93	7,22
Luwu Utara	6,67	7,49	7,6	8,42	7,11
Luwu Timur	6,85	1,58	3,07	3,44	1,17
Toraja Utara	7,69	8,01	8,22	8,11	7,56
Makassar	7,44	8,03	8,2	8,42	8,79
Pare-Pare	6,28	6,87	6,97	5,58	6,65
Palopo	6,48	6,95	7,17	7,52	6,75
Sulawesi Selatan	7,19	7,42	7,21	7,07	6,92

¹⁾ Data sementara

²⁾ Data sangat sementara

Sumber : BPS Pinrang

Pada tahun 2019, pertumbuhan ekonomi kabupaten Pinrang sebesar 6,53 persen yang menduduki posisi ke-14 setelah kota Pare-pare, yangmana nilai tersebut secara umum sejak lima tahun terakhir, tahun ini (2019) berada pada laju pertumbuhan

terendah yaitu sebesar 6,53 persen. Pertumbuhan ekonomi tersebut juga masih berada di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan yang berada pada 6,92 persen (Tabel 2.4).

Tabel 2.5 PDRB Perkapita Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku, 2015-2019 (Juta Rupiah)

Lapangan Usaha		PDRB Perkapita				
		2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	15,48	19,31	21,32	22,85	23,44
B	Pertambangan dan Penggalian	0,92	1,04	1,16	1,32	1,43
C	Industri Pengolahan	2,23	2,5	2,80	2,96	3,27
D	Pengadaan Listrik, Gas	0,02	0,03	0,03	0,04	0,04
E	Pengadaan Air	0	0	0	0,00	0,00
F	Konstruksi	3,45	3,84	4,25	4,90	5,65
G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,49	5,22	5,77	6,75	7,61
H	Transportasi dan Pergudangan	0,92	1,06	1,12	1,25	1,38
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,31	0,35	0,39	0,45	0,50
J	Informasi dan Komunikasi	0,77	0,86	0,97	1,11	1,23
K	Jasa Keuangan	0,75	0,87	0,93	1,03	1,07
L	Real Estate	1,2	1,35	1,44	1,56	1,65
M,N	Jasa Perusahaan	0,04	0,04	0,05	0,05	0,06
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,59	1,52	1,63	1,94	2,11
P	Jasa Pendidikan	0,97	1,09	1,23	1,39	1,53
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,45	0,5	0,56	0,62	0,69
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,25	0,28	0,32	0,37	0,40
Produk Domestik Regional Bruto		35,83	39,87	43,93	48,59	52,05

Sumber : BPS Pinrang

Tidak hanya pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita juga mempunyai peran penting dalam menggambarkan kondisi perekonomian suatu wilayah. Selama lima tahun terakhir sektor pertanian, kehutanan dan perikanan berpengaruh terbesar terhadap

pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pinrang. PDRB perkapita tahun 2019 sebesar 23,44 juta rupiah, persentase tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sektor PDRB perkapita tertinggi selanjutnya yaitu sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 7,61 juta rupiah dan terkecil di sektor pengadaan air yang nilainya nol dibawah dua digit dibelakang koma (Tabel 2.5).

Tabel 2.6 PDRB Perkapita Menurut Kabupaten/Kota Atas Dasar Harga Berlaku, 2015-2019 (Juta Rupiah)

Kabupaten/Kota	PDRB Per kapita				
	2015	2016	2017	2018 ^{a)}	2019 ^{a)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kep. Selayar	31,86	35,46	39,27	43,62	47,5
Bulukumba	23,31	26,06	29,03	31,55	33,8
Bantaeng	30,42	34,13	37,41	41,63	46,8
Jeneponto	19,69	21,94	23,94	26,03	27,74
Takalar	23,78	26,73	29,21	31,51	34,01
Gowa	19,03	21,04	22,98	25,07	27,1
Sinjai	31,57	34,61	37,89	41,88	44,9
Maros	45,94	52,09	56,12	60,92	64,33
Pangkep	56,94	62,92	67,6	71,98	77,46
Barru	28,87	31,75	34,51	38,09	41,71
Bone	31,36	35,15	39,04	43,87	47,5
Soppeng	30,27	34,89	39,19	44,12	48,18
Wajo	38,45	41,94	45,08	47,15	49,87
Sidrap	32,12	36,66	40,24	43,25	46,01
Pinrang	35,83	39,78	43,95	48,29	52,05
Enrekang	26,2	29,22	31,28	32,81	35,36
Luwu	29,59	33,55	36,56	40,2	43,25
Tana Toraja	21,43	23,72	26,15	29,31	31,96
Luwu Utara	28,73	32,02	35,02	38,65	41,7
Luwu Timur	69,73	61,72	63,71	69,41	70,07
Toraja Utara	26,1	29,91	33,8	37,84	41,5
Makassar	78,94	87,13	95,67	106,23	116,87
Pare-Pare	36,5	39,35	42,88	45,94	49,8
Palopo	31,68	34,04	36,83	40,32	43,02
Sulawesi Selatan	39,95	43,86	47,82	52,64	57,03

Sedangkan pada Tabel 2.6 menunjukan bahwa pada tahun 2019, PDRB perkapita Kabupaten Pinrang berada pada urutan ke lima PDRB tertinggi se-Sulawesi Selatan (52,05 juta rupiah) setelah Kabupaten Maros, meskipun begitu PDRB perkapita tersebut masih berada di bawah rata-rata Provinsi Sulawesi Selatan yaitu 52,03 juta rupiah.

Tabel 2.7 PDRB Sulawesi Selatan Menurut Kabupaten/Kota Atas Dasar Harga Berlaku Dan Konstan, 2018-2019 (miliar rupiah)

Kabupaten /Kota	Atas Dasar Harga Berlaku		Atas Dasar Harga Konstan	
	2018 ^(*)	2019 ^(**)	2018 ^(*)	2019 ^(**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kep. Selayar	5.857,28	6.442,68	3422,67	3684,74
Bulukumba	13.198,92	14.214,59	8121,33	8567,45
Bantaeng	7.769,50	8.781,04	5075,84	5621,52
Jeneponto	9.416,91	10.089,86	6338,74	6685,62
Takalar	9324,82	10157,35	6190,67	6616,25
Gowa	19071,98	20938,87	12825,81	13783,11
Sinjai	10163,06	10960,62	6681,25	7090,28
Maros	21311,33	22717,97	13558,74	13726,28
Pangkep	23944,89	25990,11	16168,91	17205,16
Barro	6614,10	7271,22	4466,54	4797,43
Bone	33120,53	36034,72	20660,07	22108,04
Soppeng	10005,94	10937,39	6494,39	6993,51
Wajo	18709,89	19838,81	12357,35	12858,45
Sidrap	12937,37	13893,72	8075,03	8450,69
Pinrang	18087,78	19630,32	11987,44	12770,55
Enrekang	6719,80	7279,77	4302,05	4535,55
Luwu	14441,94	15657,62	9155,58	9.728,97
Tana Toraja	6824,87	7.479,77	4.251,26	4.558,14
Luwu Utara	11999,26	13047,33	7.675,20	8.221,20
Luwu Timur	20393,89	20996,75	15.837,80	16.022,95
Toraja Utara	8696,50	9.596,35	4.778,53	5.140,01
Makassar	160207,64	178.430,06	112.568,41	122.465,83
Pare-Pare	6602,36	7.230,40	4.639,40	4.947,79
Palopo	7285,14	7.942,48	5.102,99	5.447,36
Sulawesi Selatan	461 719,49	504 746,87	309 202,40	330 605,13

Sedangkan, berdasarkan keterbandingan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Pinrang menduduki posisi ke delapan PDRB terbesar se-Provinsi Sulawesi Selatan dan berada tepat di bawah Kabupaten Wajo yang berada pada posisi ke tujuh pada tahun 2019.

Tabel 2.8 Peranan PDRB Menurut Kabupaten/Kota Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010 dan 2019 (Persen)

Kabupaten/Kota	Peranan/Share		Rank Share	
	2010	2019 ^(*)	2010	2019 ^(**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kep. Selayar	1,05	1,27	24	24
Bulukumba	2,76	2,81	10	10
Bantaeng	1,57	1,74	18	18
Jeneponto	2,07	2	15	16
Takalar	1,93	2,01	16	15
Gowa	4,15	4,14	7	6
Sinjai	2,2	2,17	13	13
Maros	4,26	4,49	6	4
Pangkep	5,04	5,14	4	3
Barru	1,49	1,44	21	21
Bone	6,44	7,13	3	2
Soppeng	2,16	2,16	14	14
Wajo	4,38	3,92	5	7
Sidrap	2,58	2,75	11	11
Pinrang	3,84	3,88	8	8
Enrekang	1,52	1,44	20	21
Luwu	2,98	3,1	9	9
Tana Toraja	1,39	1,48	23	20
Luwu Utara	2,48	2,58	12	12
Luwu Timur	6,89	4,15	2	5
Toraja Utara	1,46	1,9	22	17
Makassar	34,1	35,29	1	1
Pare-Pare	1,55	1,43	19	23
Palopo	1,7	1,57	17	19
Sulawesi Selatan	100	100		

Sumber : BPS Pinrang

Untuk *share* terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Pinrang tercatat pada tahun 2010 mempunyai *share* sebesar 3,84 persen dan meningkat pada tahun 2019 menjadi 3,88 persen, ini menunjukkan bahwa perkembangan perekonomian di Kabupaten Pinrang semakin meningkat. Namun sejak tahun 2010 peringkat Kabupaten Pinrang masih sama yaitu peringkat ke delapan se-Provinsi Sulawesi Selatan (Tabel 2.8).

03

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

IPM 73,49



70,07 IPM



**IPG
95,35**

<https://pinrangkab.bps.go.id>

Sebagai daerah yang cukup besar Kabupaten Pinrang tidak terlepas melakukan upaya pembangunan namun pada kenyataannya masih banyak tantangan yang harus dihadapi, salah satunya mensinergikan antara Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM). Dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat maka perencanaan pembangunan hendaknya tidak hanya mengedepankan pembangunan di bidang ekonomi ataupun pemenuhan sarana dan prasarana, melainkan juga harus melibatkan keterlibat pelaku atau dalam hal ini adalah masyarakat terutama masyarakat yang mempunyai SDM yang unggul agar dapat berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan.

Konsep klasik pembangunan yang memberikan perhatian utama pada pertumbuhan ekonomi, nampaknya mulai dikesampingkan dikarenakan disparitas kota/desa sangat berpengaruh. Oleh karenanya sudut pandang pembangunan manusia dapat memperluas pembahasan tentang konsep pembangunan dari diskusi tentang cara-cara (pertumbuhan PDB) ke diskusi tentang tujuan akhir dari pembangunan. Pembangunan manusia juga merupakan perwujudan jangka panjang, yang meletakkan pembangunan di sekeliling manusia, dan bukan manusia di sekeliling pembangunan. Sehingga SDM tidak hanya dilihat dari kuantitasnya tetapi juga harus diperhatikan aspek kualitas.

Sejauh ini pemerintah telah melakukan berbagai usaha dalam usaha meningkatkan kualitas manusia, mencakup aspek kesehatan, pendidikan, pendapatan atau daya beli maupun aspek moralitas. Tidak dipungkiri berbagai upaya tersebut semata-mata untuk mencapai tujuan utama yaitu menciptakan SDM yang berkualitas. Oleh karena itu, pembangunan bukan perkara mudah karena mencakup segi-segi kehidupan yang kompleks maka diperlukan indikator yang dapat mencerminkan keberhasilan pembangunan manusia. Alat ukur inilah yang dikenal dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Secara konseptual IPM adalah alat untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia dari suatu wilayah yang terdiri dari tiga dimensi dasar pembangunan manusia, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*) serta standar hidup layak (*a decent standard of living*). Ketiganya diukur dengan angka harapan hidup, pencapaian pendidikan dan pendapatan per kapita yang telah disesuaikan menjadi paritas daya beli. IPM adalah suatu ringkasan dan bukan suatu

ukuran komprehensif dari pembangunan manusia. Meskipun tidak mengukur semua dimensi dari pembangunan manusia, namun IPM dinilai mampu mengukur dimensi pokok dari pembangunan manusia.

Dengan semakin berkembangnya teknik perhitungan IPM yang akan lebih mengakomodir kelemahan yang ada, maka pada tahun 2010 UNDP memperkenalkan penghitungan IPM dengan metode baru. Tepatnya pada tahun 2011 dan 2014 dilakukan penyempurnaan metodologi IPM dan hasilnya pada tahun yang sama UNDP mencatat beberapa negara yang mengalami kemajuan tercepat dalam peningkatan IPM. Tercatat Indonesia dalam kurun waktu 1970-2010 termasuk dalam *World's Top Movers in HDI Improvement*. IPM Indonesia tahun 2019 sebesar 71,92 (kategori tinggi) dan menduduki peringkat 116 dari 188 negara yang tercatat.

Selanjutnya Kabupaten Pinrang sebagai bagian dari Negara Kesatuan Negara Indonesia (NKRI), juga mempunyai peran penting dalam pembentukan IPM Indonesia. Kabupaten Pinrang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki pertumbuhan penduduk dan ekonomi yang cukup baik. Oleh karenanya menarik untuk melihat aspek atau komponen-komponen pembentuk IPM di Kabupaten Pinrang secara rinci pada Tabel 3.1 di bawah ini.

Tabel 3.1 IPM dan Komponen Pembentuknya Kabupaten Pinrang, Tahun 2015-2019

Komponen	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Angka Harapan Hidup (tahun)	68,43	68,55	68,68	68,98	69,39
Harapan Lama Sekolah	13,17	13,18	13,19	13,2	13,22
Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	7,47	7,48	7,54	7,84	7,85
Pengeluaran Perkapita Disesuaikan (000 Rp PPP)	10 791	10 899	11 279	11508	11828
IPM	69,24	69,42	69,9	70,62	71,12

Sumber : BPS Pinrang

Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat

Indikator yang menggambarkan dimensi ini adalah Angka Harapan Hidup (AHH). AHH merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Angka Harapan Hidup dapat mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. Selain itu, AHH juga digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk. AHH yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program

sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pengentasan kemiskinan.

Sejak tahun 2015-2019 AHH Kabupaten Pinrang terus mengalami peningkatan, hal ini menunjukkan bahwa beberapa kebijakan pemerintah telah berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2109 AHH Kabupaten Pinrang sebesar 69,39 yang artinya bayi-bayi yang dilahirkan di Kabupaten Pinrang pada tahun 2017 diperkirakan akan bertahan hidup hingga 69 sampai 70 tahun lagi (Tabel 3.1).

Dimensi Pengetahuan

Dimensi pengetahuan yang dapat diukur melalui tingkat pendidikan. Dalam hal ini, indikator yang digunakan adalah rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling*) dan harapan lama sekolah (*expected years of schooling*). Pada proses pembentukan IPM, penggabungan kedua indikator ini digunakan sebagai indeks pengetahuan sebagai salah satu komponen pembentuk IPM.

Rata-rata lama sekolah (RLS) menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Cakupan penduduk yang dihitung RLS adalah penduduk berusia 25 tahun keatas. Pada tahun 2019, RLS sebesar 7,85 tahun yang artinya rata-rata penduduk Kabupaten Pinrang bersekolah sampai dengan 7-8 tahun yang bisa diartikan sampai kelas 1-2 SMP. Karena semakin tinggi angka RLS maka semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkannya. Namun setidaknya dalam kurun waktu 2015-2019 telah menunjukkan tren kearah positif, yang artinya berbagai program pemerintah Kabupaten Pinrang untuk meningkatkan RLS ini berjalan.

Sedangkan, harapan lama sekolah (HLS) adalah lamanya sekolah dalam tahun yang diharapkan akan dirasakan oleh anak umur tertentu pada masa mendatang. HLS dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. Seperti halnya RLS, HLS juga menggunakan batasan yang dipakai sesuai kesepakatan beberapa negara. Batas maksimum untuk harapan lama sekolah adalah 18, sedangkan batas minimumnya 0 (nol). Pada tahun 2019, HLS sebesar 13,22 tahun yang artinya rata-rata penduduk Kabupaten Pinrang mengharapkan akan sekolah hingga tamat SMA dan menduduki perguruan tinggi walaupun tidak sampai tamat (Tabel 3.1).

Dimensi Standar Hidup Layak

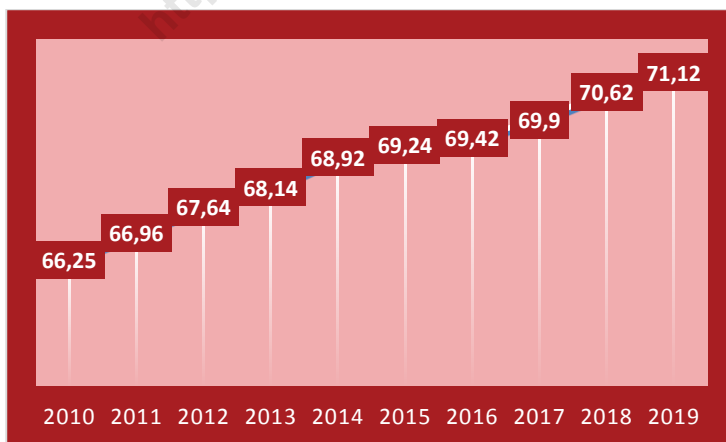
Dimensi selanjutnya dari ukuran kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak. Dalam cakupan lebih luas, standar hidup layak menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya

ekonomi. Standar hidup layak diproksi dengan indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (PPP).

Pada tahun 2019 menunjukkan bahwa paritas daya beli (PPP) sebesar Rp.11.828,-(Tabel 3.1). Yang artinya paritas daya beli penduduk di Kabupaten Pinrang cukup tinggi. Kondisi ini tidak terlepas dari lokasi yang dekat dengan kota-kota penyangga seperti kota Pare-Pare dan Makasar. Akses yang mudah dan budaya masyarakat bugis yang konsumtif menyebabkan paritas daya beli juga tinggi.

Berdasarkan beberapa indikator yang telah disebutkan sebelumnya diperoleh nilai IPM Kabupaten Pinrang tahun 2019 adalah sebesar 71,12. Apabila mengacu pada skala internasional, sejak tahun 2010 hingga tahun 2017 IPM Kabupaten Pinrang masih stagnan pada kategori IPM sedang karena nilai IPM nya kurang dari 70. Akan tetapi, sejak dua tahun terakhir IPM Kabupaten Pinrang berada pada kategori tinggi (Gambar 3.1). Tumbuhnya berbagai pusat bisnis dan pertanian ternyata mampu mempertahankan IPM Kabupaten Pinrang kearah yang lebih baik, terbukti saat ini sudah mencapai 70. Secara umum, proses pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Pinrang sudah cukup baik. Meskipun demikian karena manusia selalu tumbuh dan berkembang yang selalu seiring dengan perubahan kebutuhan dan tuntutan kehidupan, maka masih banyak hal yang perlu dibenahi oleh pemerintah Kabupaten Pinrang.

Gambar 3.1 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pinrang, Tahun 2010-2019



Sumber : BPS Pinrang

Sedangkan untuk lingkup Sulawesi Selatan, IPM Kabupaten Pinrang menempati posisi ke-6 pada tahun 2019 dengan IPM 71,12 dengan laju 0,71. Posisi ini cukup tinggi dibandingkan kabupaten-kabupaten lain di Provinsi Sulawesi Selatan, meskipun begitu nilai tersebut masih di bawah IPM Sulawesi Selatan yang sebesar 71,66. Sedangkan untuk IPM tertinggi adalah kota Makassar (82,25). Kemudian disusul oleh Kota Palopo (77,98) dan Kota Pare-pare (77,62).

Tabel 3.2 IPM Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2015-2019

Kabupaten/Kota	2015	2016	2017	2018	2019	Peringkat IPM 2019	Laju IPM (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Kep. Selayar	64,32	64,95	65,39	66,04	66,91	22	1,32
Bulukumba	65,58	66,46	67,08	67,7	68,28	17	0,86
Bantaeng	66,2	66,59	67,27	67,76	68,3	15	0,80
Jeneponto	61,61	61,81	62,67	63,33	64	24	1,06
Takalar	64,07	64,96	65,48	66,07	66,94	21	1,32
Gowa	66,87	67,7	68,33	68,87	69,66	10	1,15
Sinjai	64,48	65,36	65,8	66,24	67,05	20	1,22
Maros	67,13	67,76	68,42	68,94	69,5	11	0,81
Pangkep	66,65	66,86	67,25	67,71	68,29	16	0,86
Barru	68,64	69,07	69,56	70,05	70,6	8	0,79
Bone	63,11	63,86	64,16	65,04	65,67	23	0,97
Soppeng	65,33	65,95	66,67	67,6	68,26	18	0,98
Wajo	66,9	67,52	68,18	68,57	69,05	14	0,70
Sidrap	69	69,39	69,84	70,6	71,05	7	0,64
Pinrang	69,24	69,42	69,9	70,62	71,12	6	0,71
Enrekang	70,03	70,79	71,44	72,15	72,66	5	0,71
Luwu	68,11	68,71	69,02	69,6	70,39	9	1,14
Tana Toraja	65,75	66,25	66,82	67,66	68,25	19	0,87
Luwu Utara	67,44	67,81	68,35	68,79	69,46	12	0,97
Luwu Timur	70,43	70,95	71,46	72,16	72,8	4	0,89
Toraja Utara	66,76	67,49	67,9	68,49	69,23	13	1,08
Makassar	79,94	80,53	81,13	81,73	82,25	1	0,64
Pare-Pare	76,31	76,48	76,68	77,19	77,62	3	0,56
Palopo	76,27	76,45	76,71	77,3	77,98	2	0,88
Sulawesi Selatan	69,15	69,76	70,34	70,9	71,66		1,07

Tabel 3.3 Komponen IPM Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2018 & 2019

Kabupaten/ Kota	Angka Harapan Hidup (tahun)		Harapan Lama Sekolah (tahun)		Rata-rata Lama Sekolah (tahun)		Pengeluaran Perkapita Disesuaikan (000 Rp PPP)	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Kep. Selayar	68,03	68,34	12,46	12,48	7,40	7,63	8 666	9 028
Bulukumba	67,27	67,69	12,79	12,91	7,34	7,43	10 331	10 480
Bantaeng	70,11	70,42	12,01	12,03	6,47	6,48	11 153	11 592
Jeneponto	65,89	66,24	11,95	11,97	6,21	6,48	8 957	9 078
Takalar	66,64	67,01	12,22	12,25	6,91	7,18	10 134	10 474
Gowa	70,11	70,37	13,29	13,48	7,75	7,97	9 179	9 369
Sinjai	66,83	67,17	12,85	12,87	7,29	7,48	9 098	9 465
Maros	68,74	68,98	12,99	13,02	7,43	7,46	10 558	10 981
Pangkep	66,12	66,49	12,41	12,51	7,49	7,60	11 197	11 392
Barro	68,60	68,91	13,56	13,57	7,86	7,96	10 622	10 911
Bone	66,50	66,88	12,67	12,80	6,97	6,98	8 686	8 954
Soppeng	69,02	69,43	12,57	12,73	7,63	7,74	9 291	9 444
Wajo	66,79	67,17	13,11	13,13	6,79	6,80	12 057	12 399
Sidrap	69,15	69,59	12,91	12,93	7,79	7,83	11 834	12 039
Pinrang	68,98	69,39	13,20	13,22	7,84	7,85	11 508	11 828
Enrekang	70,55	70,83	13,68	13,69	8,68	8,89	10 683	10 800
Luwu	69,84	70,19	13,30	13,32	7,97	8,15	9 705	10 085
Tana Toraja	72,80	73,15	13,50	13,58	7,94	8,02	7 087	7 253
Luwu Utara	67,90	68,31	12,39	12,42	7,53	7,78	11 429	11 583
Luwu Timur	70,03	70,38	12,81	12,82	8,45	8,54	12 346	12 802
Toraja Utara	73,09	73,35	13,35	13,37	7,76	7,92	7 783	8 083
Makassar	71,70	72,00	15,55	15,56	11,09	11,20	16 597	16 989
Pare-Pare	70,88	71,18	14,47	14,49	10,29	10,30	13 303	13 648
Palopo	70,49	70,79	15,06	15,07	10,51	10,75	12 662	12 986
Sulsel	70,08	70,43	13,34	13,36	8,02	8,26	10 814	11 118

Sumber : BPS Pinrang

Secara umum, IPM kabupaten Pinrang relatif baik pada tahun 2019 tetapi nilai tersebut lebih rendah dari IPM Provinsi Sulawesi Selatan yang dibuktikan dengan nilai

komponen penyusun IPM seperti AHH sebesar 69,39 tahun sedangkan AHH provinsi sebesar 70,43 tahun. Untuk HLS Kabupaten Pinrang masih berada di bawah HLS Provinsi Sulawesi Selatan yaitu 13,22 tahun dan RLS Kabupaten Pinrang juga masih berada di bawah Provinsi Sulawesi Selatan yaitu 7,85. Selanjutnya, pada komponen daya beli yang ditunjukkan oleh PPP bahwa nilai PPP kabupaten Pinrang lebih tinggi dibandingkan Provinsi Sulawesi Selatan yaitu Rp. 11.828,-, sedangkan PPP Sulawesi Sulawesi Selatan hanya sebesar Rp. 11.118,-.(Tabel 3.3).

Dengan AHH yang berada dibawah rata-rata Provinsi Sulawesi Selatan, diharapkan pemerintah Kabupaten Pinrang dapat lebih meningkatkan sarana dan prasarana bidang kesehatan, sehingga masyarakat dapat sejahtera dengan memiliki umur yang panjang dan sehat.

Kendati data RLS dan HLS di Kabupaten Pinrang sudah menunjukan kearah yang positif bukan berarti pemerintah berpuas akan pencapaian tersebut. HLS merupakan pemicu (*booster*) bagi peningkatan pembangunan manusia di bidang pendidikan. Karena itu diharapkan pemerintah Kabupaten Pinrang untuk lebih meningkatkan lagi sarana prasarana serta kualitas pendidikan agar yang berdampak pula pada pembangunan manusia yang baik di bidang pendidikan.

Telah disebutkan sebelumnya, bahwa Kabupaten Pinrang menduduki peringkat ke enam tertinggi dalam pembangunan manusia di Provinsi Sulawesi Selatan. Hal tersebut menjadikan pemerintah Kabupaten Pinrang hendaknya tetap mawas diri dan tetap terus melakukan upaya-upaya pembangunan dengan lebih meningkatkan kualitas pembangunan tidak hanya kuantitasnya saja. Sehingga, kedepannya pembangunan manusia di Kabupaten Pinrang semakin baik yang ditunjukkan dengan terus meningkatnya nilai IPM.

Selain pembangunan manusia, Kabupaten Pinrang juga perlu memperhatikan mengenai kesetaraan gender.Hal ini sesuai dengan salah satu tujuan dari *Sustainable Development Goals* (SDGs) yaitu mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Kesetaraan gender juga berarti bahwa laki-laki dan perempuan memiliki peran yang sama dalam merealisasikan apa yang menjadi hak asasi mereka dan mampu berkontribusi dalam pembangunan baik pada bidang ekonomi, sosial-budaya maupun politik.

Namun IPM nyatanya belum mempertimbangkan ketimpangan gender sehingga UNDP mengembangkan *Gender Development Index* atau Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebagai turunan IPM. Melalui IPG dapat diukur kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan.

Tabel 3.4 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Kabupaten/ Kota, 2014-2019

Kabupaten / Kota	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
						IPM LK	IPM PR	IPG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Kep. Selayar	91,37	91,82	*	90,97	91,96	71,92	66,11	91,92
Bulukumba	95,74	96,08	*	96,56	96,45	70,66	68,25	96,59
Bantaeng	96,86	96,38	*	95,28	95,30	69,48	66,22	95,31
Jeneponto	90,16	90,17	*	90,94	91,30	68,42	62,70	91,64
Takalar	86,91	87,37	*	86,76	87,24	71,42	62,34	87,29
Gowa	87,85	87,92	*	87,69	87,24	74,48	64,94	87,19
Sinjai	98,52	98,61	*	98,01	98,13	68,15	66,92	98,20
Maros	88,61	88,84	*	88,91	88,93	74,29	66,19	89,10
Pangkep	89,74	89,75	*	89,26	89,80	73,09	65,90	90,16
Barro	95,36	95,02	*	95,51	95,44	73,44	70,08	95,42
Bone	91,37	91,93	*	92,65	92,95	69,21	64,54	93,25
Soppeng	98,96	98,42	*	97,43	97,25	69,86	67,82	97,08
Wajo	88,86	89,10	*	89,90	90,04	73,69	66,42	90,13
Sidrap	91,5	91,51	*	92,21	91,90	75,04	69,10	92,08
Pinrang	94,89	94,73	*	95,44	95,45	73,49	70,07	95,35
Enrekang	98,08	97,95	*	98,12	97,99	73,57	71,59	97,31
Luwu	91,88	91,89	*	92,52	92,28	74,08	68,15	92,00
Tana Toraja	86,38	86,57	*	87,18	87,86	72,99	64,36	88,18
Luwu Utara	88,55	88,68	*	88,87	88,94	73,06	65,18	89,21
Luwu Timur	89,02	89,31	*	89,49	89,38	77,32	69,29	89,61
Toraja Utara	85,04	85,61	*	86,03	86,38	73,38	63,68	86,78
Kota Makassar	93,58	93,96	*	94,70	94,53	84,47	79,81	94,48
Kota Pare Pare	97,27	97,29	*	97,47	96,87	79,39	76,83	96,78
Kota Palopo	96,81	97,20	*	97,57	97,75	79,38	77,28	97,35
Sulawesi Selatan	92,6	92,92	*	92,84	93,15	75,42	70,21	93,09

Ket : *) Tidak tersedia karena tidak dilaksanakan survei sakernas 2016

Sumber : BPS Pinrang

Dengan adanya ukuran terpisah antara IPM laki-laki dan IPM perempuan, maka interpretasi tentang kualitas hidup masing-masing kelompok gender tersebut dapat

dilakukan secara parsial. Kualitas manusia dalam IPM diukur dari dimensi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Pada Tahun 2019 di Kabupaten Pinrang IPM laki-laki 73,49 dan IPM perempuan 70,07. Secara umum kualitas perempuan masih berada di belakang dibandingkan dengan laki-laki. Meskipun begitu, kedua IPM tersebut termasuk ke dalam kategori tinggi. Akan tetapi dari sisi kecepatannya, capaian pembangunan perempuan memiliki akselerasi yang lebih tinggi. Hal inilah yang menjadi pendorong peningkatan IPG selama beberapa tahun. Sejak tahun 2013, IPG sudah melebihi angka 90, dan di tahun 2019 nilainya sudah mencapai 95,35

Capaian IPM yang tinggi tidak serta merta memberikan IPG yang tinggi. Meskipun IPM laki-laki dan perempuan di suatu wilayah sudah berada pada level yang tinggi, jika tidak setara maka akan memberikan IPG yang lebih rendah. Demikian pula sebaliknya. IPG yang lebih tinggi dapat terjadi pada wilayah yang memiliki IPM laki-laki dan perempuan yang lebih rendah namun setara. Hal ini terjadi pada kasus Kabupaten Pinrang yaitu IPM laki-laki dan perempuan di Kabupaten ini lebih tinggi dibandingkan kabupaten Soppeng, namun nilai IPG kabupaten Soppeng lebih tinggi dibandingkan kabupaten Pinrang. Penyebabnya adalah gap antara IPM laki-laki dan perempuan di Kabupaten Pinrang lebih besar dibandingkan kabupaten Soppeng pada tahun 2019 (Tabel 3.4).

Berbagai upaya untuk mendorong kapabilitas perempuan Indonesia di segala bidang telah dilakukan oleh pemerintah. Salah satunya melalui produk-produk hukum yang lebih memberikan kesempatan kepada perempuan untuk berkontribusi. Selain meningkatkan kemampuan dasar seperti pendidikan dan pelatihan tenaga kerja, program pemberdayaan perempuan juga memperjuangkan peningkatan jumlah peran perempuan dalam pembangunan.

Dalam pelaksanaannya pemerintah telah membangun kerjasama antar kementerian dan menyusun anggaran yang responsif gender. Disamping itu untuk lebih mengintensifkan pelaksanaan pemberdayaan perempuan di daerah, Pemerintah Daerah harus melaksanakannya sesuai amanat UU Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Dengan sinergi yang baik antara program pemerintah pusat dan daerah, diharapkan pemberdayaan perempuan di Indonesia menjadi lebih nyata dan menyeluruh. Untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan pemberdayaan perempuan. Hal tersebut tidak terkecuali Kabupaten Pinrang, sehingga pengukuran Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menjadi sangat penting.

Tabel 3.5 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Kabupaten/ Kota, 2015-2019

Kabupaten/ Kota	2015	2017	2018	2019			
				Keterlibatan perempuan di Parlemen (%)	Perempuan sbg Tenaga Profesional (%)	Sumbangan Pendapatan Perempuan (%)	IDG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Kep. Selayar	62,75	64,74	64,69	20,00	59,26	31,85	68,03
Bulukumba	63,74	67,16	66,78	20,00	57,26	34,19	69,89
Bantaeng	79,24	77,74	80,53	32,00	56,43	36,84	80,27
Jeneponto	67,39	67,93	72,37	20,00	60,70	31,89	68,04
Takalar	68,87	66,60	70,55	26,67	55,88	28,38	70,66
Gowa	67,99	69,01	61,06	28,89	48,45	34,09	78,31
Sinjai	69,69	72,56	70,24	26,67	61,92	33,83	72,48
Maros	64,55	65,16	65,48	25,71	44,49	26,70	69,93
Pangkep	57,28	56,96	56,20	8,57	60,08	31,82	57,03
Barru	64,62	63,54	69,24	20,00	59,63	26,12	63,41
Bone	62,49	62,75	63,16	8,89	58,84	32,13	58,55
Soppeng	65,76	69,35	73,75	23,33	61,03	34,05	71,45
Wajo	59,72	60,62	61,07	10,00	60,87	27,01	55,09
Sidrap	49,16	49,02	52,71	8,57	48,87	29,47	56,80
Pinrang	59,02	59,61	61,73	15,00	55,60	35,41	67,92
Enrekang	58,59	58,68	59,36	10,00	70,12	36,65	58,28
Luwu	62,47	61,61	63,58	5,71	65,50	36,80	55,89
Tana Toraja	73,38	73,99	74,14	13,33	55,23	42,67	69,32
Luwu Utara	43,74	44,98	46,24	0,01	58,20	20,71	38,92
Luwu Timur	45,72	45,96	46,06	6,67	50,68	22,89	50,76
Toraja Utara	57,8	56,04	56,15	10,00	51,39	35,01	62,58
Kota Makassar	69,21	68,73	67,89	26,53	45,26	35,36	78,32
Kota Pare- Pare	61,86	61,56	66,62	24,00	45,11	31,78	73,86
Kota Palopo	70,91	70,85	74,87	28,00	56,99	34,30	77,53
Sulawesi Selatan	67,98	70,57	69,14	27,71	53,02	32,44	76,01

Sumber : BPS Pinrang

IDG Kabupaten Pinrang tahun 2019 berada pada 67,92 persen atau mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya yaitu sebesar 61,73 persen (Tabel 3.5). Jika dilihat dari komponen pembentuknya, peningkatan IDG Kabupaten Pinrang pada tahun 2019 disebabkan oleh peningkatan keterlibatan perempuan di parlemen yang semula 10 persen pada tahun 2018 menjadi 15 persen pada tahun 2019 serta persentase sumbangan pendapatan perempuan 34,48 persen pada tahun 2018 menjadi 35,41 persen pada tahun 2019. Sementara persentase jumlah perempuan yang berprofesi sebagai tenaga profesional menurun 2,86 persen menjadi 55,6 persen pada tahun 2019. Di antara ketiga variabel tersebut, capaian perempuan sebagai tenaga profesional merupakan yang tertinggi bahkan melawati capaian laki-laki. Artinya daya serap tenaga kerja profesional perempuan di Kabupaten Pinrang lebih baik dibandingkan laki-laki.

Hal yang lumrah terjadi di dunia jika pemberdayaan perempuan yang lebih rendah dari laki-laki. Meskipun upaya pemberdayaan perempuan mengalami perkembangan yang cukup signifikan, namun belum mendapatkan hasil yang maksimal khususnya di bidang politik dan ekonomi. Beberapa tantangan yang dihadapi antara lain karena masih adanya dikotomi antara ruang publik dan privat yang membatasi peran perempuan. Perempuan tidak memiliki daya saing secara finansial, perempuan memiliki kekurangan dalam kekuasaan ekonomi maupun sosial sehingga mengalami kesulitan untuk masuk keranah politik yang didominasi oleh kaum laki-laki (UNDP, 2010). Oleh sebab itu peningkatan kapasitas perempuan merupakan hal yang mendesak sehingga mampu mendobrak berbagai ideologi dan budaya yang menghambat peran perempuan di semua bidang pembangunan.

04

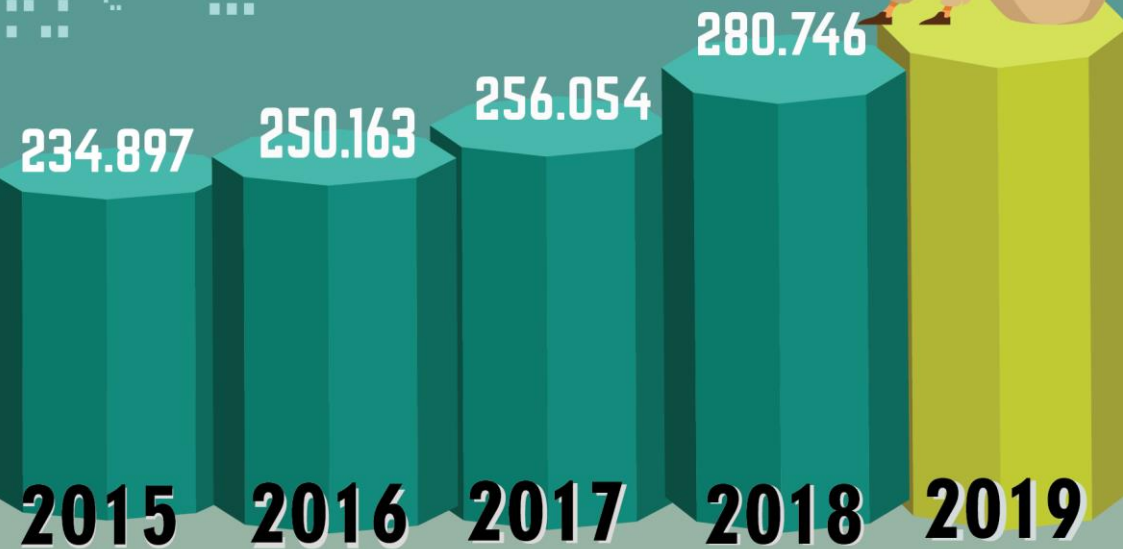
KEMISKINAN PENDUDUK

APA
KAMU
TAHU



Persentase penduduk miskin Kabupaten
Pinrang sebesar 8,46 persen dengan
gini rasio 0,34.

TERNYATA AKU HANYA
BERADA DI GARIS KEMISKINAN,
294.349 RP/KAPITA/BULAN



Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk maka akan berpotensi bertambah pula permasalahan sosial salah satunya adalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan bersifat multidimensional karena sangat erat kaitannya dengan berbagai aspek kehidupan baik sosial, ekonomi, budaya, dan aspek lainnya. Salah satu aspek penting untuk mendukung strategi penanggulangan kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat. Oleh karenanya BPS konsisten sejak tahun 1984 menghitung jumlah dan persentase penduduk miskin, yang data utamanya berasal dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Konsumsi dan Pengeluaran.

Salah satu pendekatan untuk mengukur jumlah dan persentase penduduk miskin adalah dengan pendekatan kebutuhan dasar. Dalam menghitung angka kemiskinan melalui komponen kebutuhan dasar yang digunakan BPS terdiri dari kebutuhan makanan dan bukan makanan yang disusun menurut daerah perkotaan dan perdesaan. Mulai tahun 1998 pendekatan kebutuhan dasar yang digunakan BPS telah dilakukan penyempurnaan, yaitu jumlah komponen kebutuhan dasar terdiri atas 52 jenis komoditi makanan dan 51 komoditi bukan makanan di daerah perkotaan dan 47 komoditi di daerah perdesaan. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran, yang kemudian batasan dari sisi pengeluaran inilah disebut sebagai Garis Kemiskinan. Dapat disimpulkan bahwa penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Tabel 4.1 Statistik Kemiskinan Kabupaten Pinrang Tahun 2015-2019

Kegiatan	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Jumlah Penduduk Miskin (000)	30,51	31,28	31,43	32,94	31,85
Persentase Penduduk Miskin	8,34	8,48	8,46	8,81	8,46
Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	234 897	250 163	256 054	280 746	294349

Sumber : BPS Pinrang

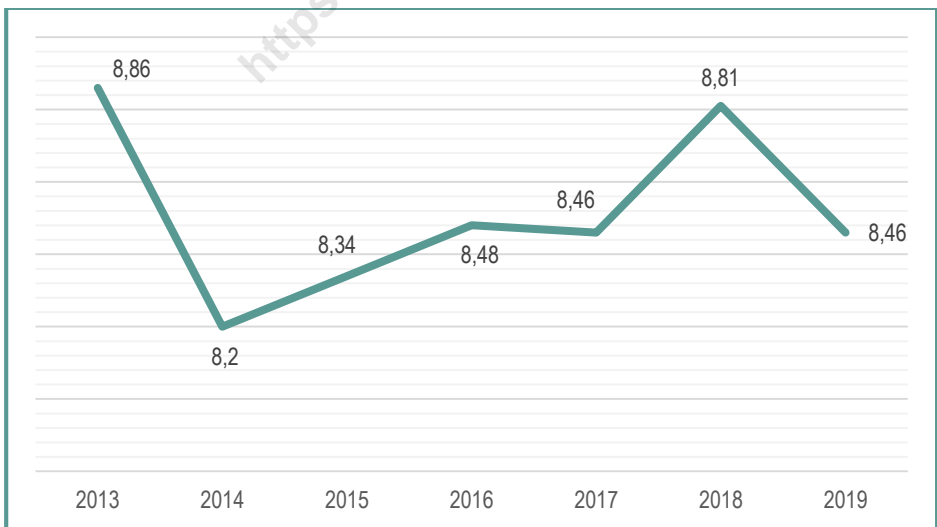
Perkembangan tingkat kemiskinan di kabupaten Pinrang pada periode tahun 2015-2019 ditunjukkan pada Tabel 4.1. Tingkat kemiskinan mencakup besaran jumlah dan persentase dari penduduk miskin. Pada periode tersebut perkembangan jumlah dan

persentase kemiskinan di Kabupaten Pinrang cenderung fluktuatif. Pada tahun 2019, persentase penduduk miskin sebesar 8,46 persen yang mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

Kecenderungan peningkatan kemiskinan baik secara absolut maupun relatif tidak terlepas dari peran kemajuan teknologi. Menjamurnya teknologi online baik dari sektor perdagangan, teknologi informasi, maupun jasa-jasa diindikasikan menjadi salah satu faktor penyebab naiknya angka kemiskinan pada kurun waktu tiga tahun terakhir. Dikarenakan perubahan proses penciptaan barang dan jasa yang awalnya membutuhkan banyak tenaga kerja secara konvensional, tetapi semenjak 'online' merebak sedikit demi sedikit penggunaan tenaga kerja pada sektor-sektor yang disebut diatas semakin tergerus pula. Inilah yang memungkinkan semakin tingginya pengangguran yang berdampak pada jumlah penduduk miskin.

Sedangkan, garis kemiskinan pada tahun 2015-2019 terus mengalami peningkatan sebesar Rp. 59.452,- perkapita per bulan, yaitu dari Rp. 234.897,- pada tahun 2014 menjadi Rp. 294.349,- pada tahun 2019. Peningkatan ini menunjukkan akan meningkatnya kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, yang berdampak pada kelompok masyarakat yang dikelompokkan 'miskin' diharapkan turun dengan berangapannya faktor-faktor lainnya tidak diikutsertakan.

Gambar 4.1 Persentase Penduduk Miskin kabupaten Pinrang Tahun 2013-2019



Sumber : BPS Pinrang

Beberapa indikator tentang kemiskinan selama dua tahun terakhir dapat dilihat melalui tabel 4.2 yang menampilkan jumlah, persentase, tingkat kedalaman kemiskinan (P1), keparahan kemiskinan (P2) dan gini rasio pada tahun 2018 dan tahun 2019.

Tabel 4.2 Indikator Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2018-2019

Kabupaten/ Kota	2018					2019				
	Jumlah (ribu)	%	P1	P2	Gini rasio	Jumlah (ribu)	%	P1	P2	Gini rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Selayar	17,59	13,13	2,82	0,89	0,34	17,36	12,83	2,87	0,9	0,30
Bulukumba	31,25	7,48	1,06	0,23	0,35	30,49	7,26	0,6	0,09	0,38
Bantaeng	17,2	9,23	1,74	0,52	0,34	16,91	9,03	1,35	0,28	0,34
Jeneponto	55,94	15,48	2,63	0,6	0,31	54,05	14,88	2,02	0,41	0,33
Takalar	26,57	9	1,61	0,39	0,36	25,93	8,7	1,08	0,19	0,48
Gowa	59,34	7,83	1,25	0,31	0,38	57,99	7,53	0,92	0,17	0,35
Sinjai	22,48	9,28	1,18	0,24	0,37	22,27	9,14	1,08	0,22	0,35
Maros	35,97	10,31	2,19	0,71	0,34	34,85	9,89	2,5	0,89	0,38
Pangkep	50,12	15,1	3,12	0,92	0,32	47,07	14,06	1,81	0,31	0,33
Barru	15,68	9,04	1,58	0,37	0,38	14,92	8,57	1,07	0,21	0,36
Bone	79,57	10,55	1,44	0,3	0,41	76,25	10,06	1,35	0,29	0,37
Soppeng	16,99	7,5	1,39	0,37	0,36	16,45	7,25	0,69	0,12	0,39
Wajo	19,73	7,5	1,24	0,3	0,37	27,48	6,91	1,06	0,26	0,35
Sidrap	15,41	5,16	0,94	0,23	0,34	14,44	4,79	0,6	0,13	0,28
Pinrang	32,94	8,81	1,16	0,26	0,36	31,85	8,46	1,54	0,40	0,34
Enrekang	25,53	12,49	1,84	0,42	0,39	25,4	12,33	1,7	0,38	0,36
Luwu	47,91	13,36	2,35	0,55	0,36	46,18	12,78	2,71	0,72	0,35
Tator	29,65	12,75	2,27	0,55	0,37	28,87	12,35	3,1	1,12	0,36
Lutra	42,43	13,69	2,43	0,67	0,36	42,48	13,6	2,55	0,61	0,36
Lutim	51,14	7,23	1,16	0,28	0,40	20,83	6,98	1,11	0,25	0,39
Toraja utara	30,68	13,37	1,59	0,3	0,41	28,64	12,41	1,99	0,46	0,38
Makassar	66,22	4,41	1,11	0,38	0,38	65,12	4,28	0,6	0,15	0,39
Pare-pare	8,01	5,59	0,75	0,17	0,38	7,62	5,26	0,71	0,15	0,35
Palopo	14,26	7,94	1,14	0,26	0,34	14,37	7,82	1,15	0,29	0,34
Sulsel	792,635	9,06	1,55	0,38	0,40	767,8	8,69	1,45	0,34	0,39

Sumber : BPS Pinrang

Telah disebutkan sebelumnya, jika masalah kemiskinan tidak hanya sekadar jumlah dan persentase penduduk miskin saja, melainkan terdapat dimensi lain yang perlu diperhatikan yaitu tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Selain menekan jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan seharusnya juga dapat mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan.

Indeks kedalaman kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Pada periode tahun 2018-2019, Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Pinrang mengalami kenaikan dari 2,82 pada tahun 2018 menjadi 2,87 pada tahun 2019. Dapat diartikan bahwa jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan (kesenjangan/ketimpangan) pada tahun 2018 relatif lebih baik bila dibandingkan dengan pada tahun 2019.

Selanjutnya, indeks Keparahannya Kemiskinan (*Poverty Severity Index-P2*) dapat memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Sama dengan indeks kedalaman kemiskinan, indeks keparahan kemiskinan juga mengalami peningkatan dari 0,26 (tahun 2018) menjadi 0,40 (tahun 2019). Kondisi ini mengindikasikan bahwa distribusi pengeluaran penduduk miskin di Kabupaten Pinrang tahun 2019 memiliki ketimpangan yang lebih tinggi dibanding tahun 2018.

Sedangkan untuk gini rasio mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, yang semula 0,36 pada tahun 2018 menjadi 0,34 pada tahun 2019. Artinya distribusi pendapatan di Kabupaten Pinrang cukup merata atau dengan kata lain ketimpangan pendapatan di Kabupaten Pinrang kecil.

- BPS Kabupaten Pinrang, 2017. Indikator Makro Sosial Ekonomi Kabupaten Pinrang 2017. Pinrang : BPS Kabupaten Pinrang
- _____, 2017. Proyeksi Penduduk Kabupaten Pinrang 2010-2020. Pinrang : BPS Kabupaten Pinrang
- Badan Pusat Statistik (BPS), 2017. Proyeksi Penduduk Kabupaten Kota Provinsi Sulawesi Selatan 2010-2020. Jakarta : Badan Pusat Statistik
- BPS Kabupaten Pinrang, 2018. Indikator Makro Sosial Ekonomi Kabupaten Pinrang 2017. Pinrang : BPS Kabupaten Pinrang
- BPS Kabupaten Pinrang, 2019. Kabupaten Pinrang Dalam Angka 2019. Pinrang : BPS Kabupaten Pinrang
- _____, 2019. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pinrang 2019
- BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2018. Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Angka 2018. Makassar : BPS Provinsi Sulawesi Selatan
- _____. Indikator Makro Sosial Ekonomi Sulawesi Selatan Triwulan 2 2019. Makassar : BPS Provinsi Sulawesi Selatan
- _____. Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Lapangan Usaha 2014-2018. Makassar : BPS Provinsi Sulawesi Selatan
- _____. Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Pengeluaran 2013-2017. Makassar : BPS Provinsi Sulawesi Selatan

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN PINRANG**

Jl. Andi Isa No.18, Pinrang 91211. Telp. (0421) 921021

Homepage: <http://pinrangkab.bps.go.id>, email: bps7315@bps.go.id